



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029

**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I, yang memuat Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan BP3KP Kalimantan I serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Dokumen Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I memuat gambaran Visi dan Misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I yang merupakan penjabaran teknis di tingkat unit kerja atas Renstra 5 (lima) Unit Organisasi meliputi Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Kami berharap Rencana Strategis ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkompeten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I ini masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Rencana Strategis ini di masa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga Tuhan selalu menyertai segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan Negara.

Pontianak, 05 Januari 2026

Kepala

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kalimantan I



Ir. Arifay Saini, S.T., M.Eng.
NIP. 197308272003121005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	8
1.1. KONDISI UMUM.....	8
1.1.1. Wilayah Kerja BP3KP Kalimantan I	8
1.1.2. Capaian Kinerja Periode 2020-2023	17
1.1.3. Capaian Kinerja Periode 2024	22
1.2. POTENSI PERMASALAHAN.....	24
1.2.1. POTENSI.....	24
1.2.2. PERMASALAHAN	26
1.2.3. MATRIKS S-W-O-T DALAM MENGHADAPI PELAKSANAAN PROGRAM	29
BAB 2 TUJUAN DAN SASARAN	31
2.1. TUJUAN BP3KP KALIMANTAN I.....	31
2.2. SASARAN PROGRAM	32
BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	35
3.1. ARAH KEBIJAKAN UNIT ORGANISASI	35
3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.....	35
3.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	36
3.1.3. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.....	37
3.1.4. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko (TKPR).....	38
3.1.5. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal	40
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BP3KP KALIMANTAN I	41
3.3. KERANGKA KELEMBAGAAN	42
3.3.1. Struktur Organisasi UPT Balai	43
3.3.2. Jumlah dan Komposisi Pegawai BP3KP Kalimantan I Berdasarkan Status Kepegawaian.....	46
3.3.3. Jumlah dan Komposisi Pegawai BP3KP Kalimantan I Berdasarkan Golongan Jabatan.....	46

3.3.4. Jumlah dan Komposisi Pegawai BP3KP Kalimantan I Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	47
3.3.5. Jumlah dan Komposisi Pegawai BP3KP Kalimantan I Berdasarkan Gender ...	47
BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	49
4.1. TARGET KINERJA	49
4.2. KERANGKA PENDANAAN	52
BAB 5 PENUTUP	56
LAMPIRAN	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023	9
Tabel 1.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024	10
Tabel 1.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota, Kepemilikan, dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024	10
Tabel 1.4 <i>Backlog</i> Perumahan Provinsi Kalimantan Barat.....	11
Tabel 1.5 Luas Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 ...	14
Tabel 1.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	14
Tabel 1.7 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota, Kepemilikan, dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	15
Tabel 1.8 <i>Backlog</i> Perumahan Provinsi Kalimantan Tengah	15
Tabel 1.9 Capaian Kinerja Tahun 2020-2023 Terhadap Perjanjian Kinerja (BP2P Kalimantan I). 18	
Tabel 1.10 Capaian Kinerja Tahun 2020-2023 Terhadap Target 2020-2023 pada Renstra BP2P Kalimantan I).....	18
Tabel 1.11 Selisih Target Capaian Kinerja Tahun 2020-2023 Terhadap Renstra BP2P Kalimantan I	21
Tabel 1.12 Capaian Output Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024.....	22
Tabel 1.13 Capaian Output Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	23
Tabel 1.14 Potensi di wilayah Kalimantan Barat berkaitan dengan bidang perumahan dan kawasan permukiman	24
Tabel 1.15 Potensi di wilayah Kalimantan Tengah berkaitan dengan bidang perumahan dan kawasan permukiman	25
Tabel 1.16 Permasalahan di wilayah Kalimantan Barat berkaitan dengan bidang perumahan dan kawasan permukiman	27
Tabel 1.17 Permasalahan di wilayah Kalimantan Tengah berkaitan dengan bidang perumahan dan kawasan permukiman	28
Tabel 1.18 Matriks SWOT dalam Pelaksanaan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam konteks di Wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah	30
Tabel 2.1 Penjabaran Program dan Kegiatan BP3KP Kalimantan I di bawah Sasasan Strategis-1	33
Tabel 2.2 Penjabaran Program dan Kegiatan BP3KP Kalimantan I di bawah Sasasan Strategis-2	34

Tabel 3.1 Intervensi Langsung dan Tidak Langsung kegiatan BP3KP Kalimantan I	42
Tabel 3.2 Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan.....	45
Tabel 3.3 Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian ASN	46
Tabel 3.4 Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Jabatan	47
Tabel 3.5 Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	47
Tabel 3.6 Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender	48
Tabel 4.1 Daftar Kegiatan BP3KP Kalimantan I.....	49
Tabel 4.2 Target Kinerja 2025-2029 BP3KP Kalimantan I	50
Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan 2025-2029 BP3KP Kalimantan I	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Wilayah Provinsi Kalimantan Barat	8
Gambar 1.2 Peta Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah	13
Gambar 1.3 Grafik Persentase Capaian Kinerja 2020-2023 Terhadap Renstra BP2P Kalimantan I (Program Perumahan dan Kawasan Permukiman)	20
Gambar 1.4 Grafik Persentase Capaian Kinerja 2020-2023 Terhadap Renstra BP2P Kalimantan I (Program Dukungan Manajemen)	20
Gambar 1.5 Grafik Capaian Tahun 2024 terhadap PK Akhir Satker PP Provinsi Kalimantan Barat	23
Gambar 1.6 Grafik Capaian Tahun 2024 terhadap PK Akhir Satker PP Provinsi Kalimantan Tengah	23
Gambar 2.1 Pohon Kinerja Sasaran Program BP3KP Kalimantan I	32
Gambar 3.1 Diagram Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PKP	43
Gambar 3.2 Struktur Koordinasi BP3KP	44
Gambar 3.3 Struktur Organisasi BP3KP	45
Gambar 1.3 Persentase Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian ASN	46
Gambar 1.4 Persentase Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	47
Gambar 1.5 Persentase Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025-2029 BP3KP Kalimantan I.....	58
Lampiran 2 Metode Perhitungan BP3KP Kalimantan I.....	62

BAB I

PENDAHULUAN



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

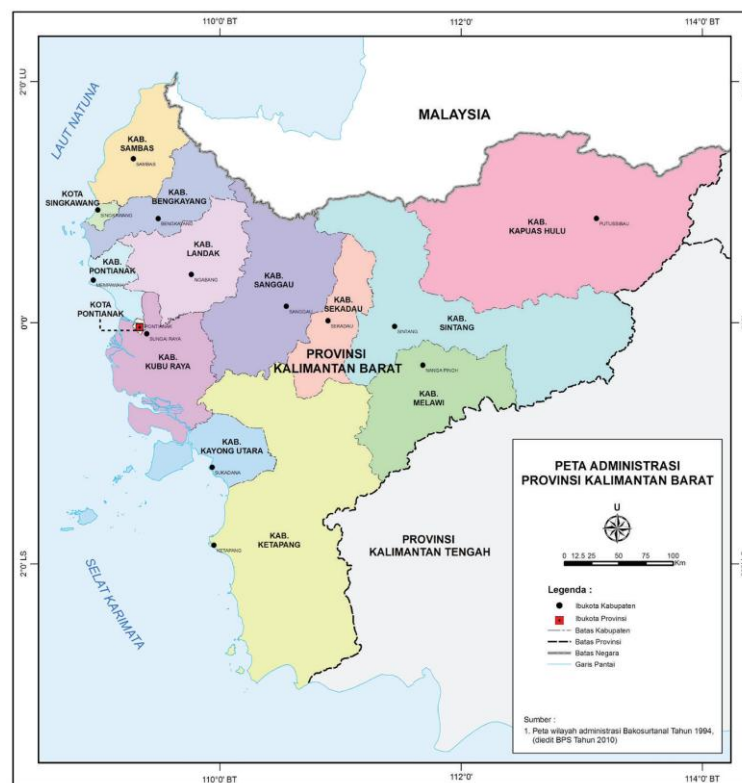
Pembahasan kondisi umum meliputi wilayah kerja BP3KP Kalimantan I, capaian kinerja periode 2021-2023, serta Capaian Kinerja Periode 2024. Berikut ini adalah pembahasan masing-masing sub-bab tersebut.

1.1.1. Wilayah Kerja BP3KP Kalimantan I

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I berada di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, memiliki dua wilayah kerja yaitu Provinsi Kalimantan Barat itu sendiri dan Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut ini merupakan gambaran umum untuk masing-masing wilayah kerja BP3KP Kalimantan I.

A. Provinsi Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan Barat (lihat Gambar 1.1) terletak di bagian barat Pulau Kalimantan, di antara 2°08' Lintang Utara hingga 3°02' Lintang Selatan serta 108°30'–114°10' Bujur Timur. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia Timur di sebelah utara, sehingga memiliki posisi strategis sebagai daerah perbatasan internasional. Di sisi timur, Kalimantan Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan di selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Adapun di barat, wilayah ini berhadapan langsung dengan Laut Natuna dan Laut Cina Selatan.



Gambar 1.1 Peta Wilayah Provinsi Kalimantan Barat
 Sumber: Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2024, BPS Provinsi Kalimantan Barat

Kondisi geografis Kalimantan Barat ditandai oleh wilayah yang sangat luas, mencapai $\pm 147.037 \text{ km}^2$ yang memiliki 12 Kabupaten dan 2 Kota (lihat Tabel 1.1), dengan bentang alam yang beragam mulai dari dataran rendah, pegunungan, hingga pesisir pantai. Bagian tengah dan utara provinsi ini didominasi oleh hutan tropis lebat serta pegunungan yang menjadi habitat keanekaragaman hayati, sementara bagian selatan dan barat lebih berupa dataran rendah yang dilalui sungai-sungai besar. Sungai Kapuas, sebagai sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang $\pm 1.143 \text{ km}$, menjadi jalur transportasi utama sekaligus sumber kehidupan masyarakat. Keunikan geografis Kalimantan Barat semakin menonjol karena garis Khatulistiwa melintasi ibu kota Pontianak, menjadikan provinsi ini dikenal sebagai “Bumi Khatulistiwa” dengan iklim tropis yang khas dan curah hujan tinggi sepanjang tahun.

Tabel 1.1 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

No.	Kabupaten / Kota	Ibukota Kabupaten / Kota	Luas (km ²)	Persentase Terhadap Luas Provinsi
1	Kabupaten Sambas	Sambas	5,938.00	4.04%
2	Kabupaten Bengkayang	Bengkayang	5,488.61	3.73%
3	Kabupaten Landak	Ngabang	8,430.71	5.73%
4	Kabupaten Mempawah	Mempawah	1,935.42	1.32%
5	Kabupaten Sanggau	Sanggau	12,452.22	8.47%
6	Kabupaten Ketapang	Ketapang	30,018.68	20.42%
7	Kabupaten Sintang	Sintang	22,025.79	14.98%
8	Kabupaten Kapuas Hulu	Putussibau	31,318.25	21.30%
9	Kabupaten Sekadau	Sekadau	5,979.04	4.07%
10	Kabupaten Melawi	Nanga Pinoh	10,122.51	6.88%
11	Kabupaten Kayong Utara	Sukadana	4,110.12	2.80%
12	Kabupaten Kubu Raya	Sungai Raya	8,549.29	5.81%
13	Kota Pontianak	Pontianak	118.21	0.08%
14	Kota Singkawang	Singkawang	550.19	0.37%
Kalimantan Barat		Pontianak	147,037.04	100.00%

Sumber: Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2024, BPS Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki luas wilayah terbesar yaitu 21.30% atau sebesar 31.318,25 km² dari total wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Ketapang menempati luasan wilayah terbesar kedua sebesar 20.42% atau 30.018,68 km². Sedangkan Kota Pontianak sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Barat hanya memiliki luas wilayah sebesar 0.08% atau sebesar 118,21 km².

Berdasarkan data yang disajikan dari BPS Provinsi Kalimantan Barat yang dapat dilihat pada Tabel 1.2, data tahun 2024 menunjukkan 91.94% Rumah Tangga di Provinsi Kalimantan Barat menempati tempat tinggal di bangunan milik sendiri, 1.40% tempat tinggal berupa Kontrak/Sewa, 6.27% Bebas Sewa, dan tempat tinggal Dinas/Lainnya sebesar 0.40%.

Tabel 1.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Milik Sendiri	Kontrak/ Sewa	Bebas Sewa	Dinas/ Lainnya	Jumlah
1	Kabupaten Sambas	96.19	NA	3.35	NA	100.00
2	Kabupaten Bengkayang	90.98	3.18	5.77	NA	100.00
3	Kabupaten Landak	96.67	NA	3.16	NA	100.00
4	Kabupaten Mempawah	95.51	NA	4.32	NA	100.00
5	Kabupaten Sanggau	92.65	NA	4.44	1.54	100.00
6	Kabupaten Ketapang	95.14	NA	4.14	NA	100.00
7	Kabupaten Sintang	93.73	NA	4.65	NA	100.00
8	Kabupaten Kapuas Hulu	96.65	NA	3.03	NA	100.00
9	Kabupaten Sekadau	95.13	NA	4.40	NA	100.00
10	Kabupaten Melawi	93.51	2.15	2.89	NA	100.00
11	Kabupaten Kayong Utara	97.31	NA	2.49	-	100.00
12	Kabupaten Kubu Raya	95.54	0.71	3.60	NA	100.00
13	Kota Pontianak	74.96	4.17	20.56	NA	100.00
14	Kota Singkawang	83.20	3.86	11.29	1.66	100.00
Kalimantan Barat		91.94	1.40	6.27	0.40	100.00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat 2024, BPS Kalimantan Barat

Tabel 1.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota, Kepemilikan, dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Ada Fasilitas				Tidak Ada Fasilitas	Jumlah
		Digunakan Sendiri	Digunakan Bersama Rumah Tangga Tertentu	MCK Komunal, MCK Umum	Tidak Menggunakan		
1	Kab. Sambas	93.47	3.82	1.33	-	1.39	100.00
2	Kab. Bengkayang	91.47	1.37	NA	-	6.55	100.00
3	Kab. Landak	83.12	3.79	-	-	13.09	100.00
4	Kab. Mempawah	90.34	1.87	NA	-	7.44	100.00
5	Kab. Sanggau	88.72	2.21	1.68	-	7.39	100.00
6	Kab. Ketapang	92.60	NA	1.04	-	5.52	100.00
7	Kab. Sintang	93.37	1.13	NA	-	4.75	100.00
8	Kab. Kapuas Hulu	90.28	3.61	1.48	-	4.63	100.00
9	Kab. Sekadau	93.59	2,58	NA	-	2.78	100.00
10	Kab. Melawi	81.79	9.71	4.00	-	4.50	100.00
11	Kab. Kayong Utara	87.11	3.71	-	-	9.18	100.00
12	Kab. Kubu Raya	88.74	3.54	NA	-	6.98	100.00
13	Kota Pontianak	93.96	5.84	NA	-	NA	100.00
14	Kota Singkawang	96.54	NA	NA	-	2.35	100.00
Kalimantan Barat		90.80	3.16	0.91	-	5.13	100.00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat 2024, BPS Kalimantan Barat

Berdasarkan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar (lihat Tabel 1.3), Sebanyak 90.80% Rumah Tangga di Provinsi Kalimantan Barat menggunakan jamban milik sendiri, 3.16% menggunakan jamban secara bersama, 0.91% merupakan MCK Komunal / Umum, serta 5.13% tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar.

Tabel 1.4 *Backlog* Perumahan Provinsi Kalimantan Barat

No.	Kabupaten/Kota	<i>Backlog</i> Kepemilikan	<i>Backlog</i> Kualitas	Total <i>Backlog</i> Perumahan
1	KAB. SINTANG	6,561	62,317	68,878
2	KAB. SANGGAU	8,665	54,139	62,804
3	KAB. LANDAK	8,954	52,094	61,048
4	KAB. KUBU RAYA	17,398	32,911	50,309
5	KAB. KETAPANG	11,976	37,064	49,040
6	KAB. SAMBAS	25,037	23,309	48,346
7	KAB. KAPUAS HULU	5,061	32,304	37,365
8	KAB. MELAWI	4,434	31,178	35,612
9	KAB. BENGKAYANG	5,907	25,899	31,806
10	KOTA PONTIANAK	22,926	7,900	30,826
11	KAB. SEKADAU	2,166	23,021	25,187
12	KAB. MEMPAWAH	10,001	13,587	23,588
13	KOTA SINGKAWANG	9,047	6,897	15,944
14	KAB. KAYONG UTARA	4,266	7,918	12,184
Total		142,399	410,538	552,937

Sumber: *Dashboard MyPKP*

Berdasarkan Tabel 1.4, total *backlog* perumahan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 mencapai 552.937 unit, terdiri atas 142.399 unit *backlog* kepemilikan dan 410.538 unit *backlog* kualitas. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan utama perumahan lebih didominasi oleh kualitas hunian ($\pm 74\%$) dibanding akses kepemilikan. *Backlog* terbesar terdapat di Kabupaten Sintang (68.878 unit), Sanggau (62.804 unit), dan Landak (61.048 unit), dengan dominasi *backlog* kualitas yang sangat tinggi. Sebaliknya, di wilayah perkotaan seperti Kota Pontianak (30.826 unit), *backlog* kepemilikan relatif lebih menonjol dibanding kualitas, mencerminkan tekanan kebutuhan rumah akibat urbanisasi.

Dari beberapa tabel yang sudah disajikan, secara umum data tersebut menunjukkan tingkat kepemilikan rumah yang sangat tinggi. Hal ini mencerminkan karakter wilayah yang masih didominasi pola rural *ownership*, di mana akses terhadap tanah relatif tersedia dan tekanan pasar perumahan belum seintensif wilayah metropolitan besar. Namun demikian, tingginya angka kepemilikan tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi kelayakan hunian. Data sanitasi menunjukkan bahwa meskipun rumah tangga secara dominan telah menggunakan fasilitas sendiri, masih terdapat rumah tangga yang belum memiliki fasilitas buang air besar, serta sebagian kecil yang menggunakan fasilitas bersama atau komunal. Kondisi ini mengindikasikan adanya kantong-kantong permukiman dengan kualitas hunian yang belum memadai, terutama di wilayah kabupaten yang secara geografis terpencil atau memiliki keterbatasan akses infrastruktur dasar. Secara spasial, terdapat perbedaan karakteristik antara wilayah perkotaan dan kabupaten. Kota-kota

seperti Pontianak dan Singkawang menunjukkan tekanan *backlog* kepemilikan yang lebih tinggi dibanding kabupaten lain, mencerminkan dinamika urbanisasi, keterbatasan lahan, dan kebutuhan hunian bagi kelompok berpenghasilan menengah bawah. Sementara itu, sebagian besar kabupaten memiliki kepemilikan rumah yang sangat tinggi, tetapi masih menghadapi tantangan peningkatan kualitas rumah dan sanitasi, yang berimplikasi pada potensi *backlog* rumah tidak layak huni (RTLH)

Merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2025-2029, dapat dirangkum beberapa aspirasi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hunian layak, layanan publik, dan regulasi di wilayah Kalimantan Barat.

1) Aspirasi Pemenuhan Kebutuhan Hunian Layak

Masyarakat Kalimantan Barat memiliki aspirasi kuat terhadap pemenuhan kebutuhan hunian yang layak, terjangkau, dan tepat sasaran sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar papan. Pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan tersedianya perumahan yang memenuhi standar teknis, kesehatan, dan keselamatan, serta didukung oleh infrastruktur dasar permukiman yang memadai, seperti jaringan air bersih dan sanitasi yang layak.

Selain itu, masyarakat mengharapkan pengembangan kawasan permukiman yang terencana, tertata, dan berkelanjutan, sehingga mampu menjawab tekanan akibat pertumbuhan penduduk dan kebutuhan hunian yang terus meningkat. Aspirasi ini juga mencakup pemerataan akses hunian layak di seluruh wilayah provinsi, termasuk kawasan perkotaan, perdesaan, dan wilayah yang berkembang.

2) Aspirasi terhadap Layanan Publik Permukiman

Masyarakat Kalimantan Barat mengharapkan peningkatan akses terhadap layanan dasar yang berkualitas, termasuk air minum, sanitasi, infrastruktur permukiman, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Akses terhadap layanan dasar dipandang sebagai faktor penting dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga mengharapkan pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan inovatif, sejalan dengan penerapan prinsip *good governance* dan penguatan partisipasi publik dalam proses pembangunan. Aspirasi ini mencerminkan kebutuhan akan layanan publik yang mudah diakses, efisien, dan akuntabel.

3) Aspirasi terhadap Regulasi dan Tata Kelola

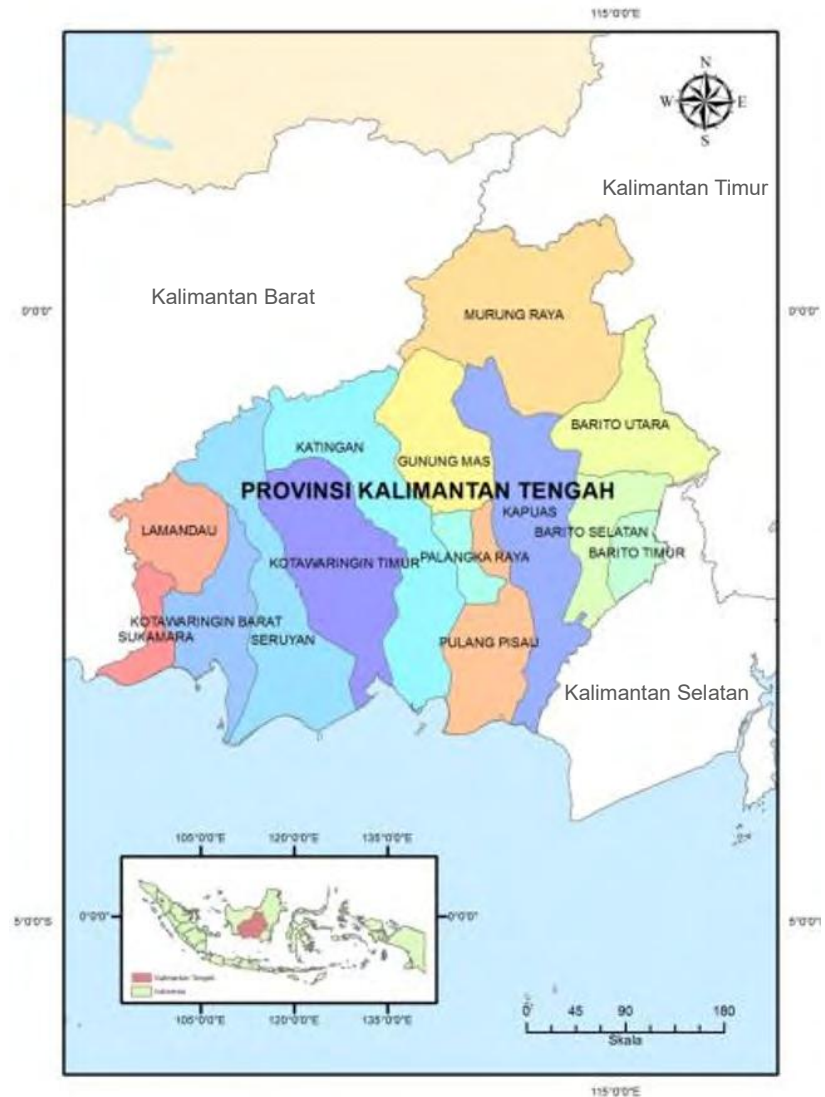
Dalam aspek regulasi, masyarakat Kalimantan Barat mengharapkan adanya kebijakan dan regulasi yang jelas, konsisten, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan perumahan dan permukiman. Penguatan tata kelola pemerintahan, transparansi kebijakan, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi aspirasi penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Masyarakat juga mengharapkan sinkronisasi perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih efektif guna mengurangi konflik ruang, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, serta menjamin keberlanjutan pembangunan wilayah.

B. Provinsi Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah secara astronomis (lihat Gambar 1.2) terletak antara 0°45' Lintang Utara dan 3°30' Lintang Selatan dan 110°45' – 115°51' Bujur Timur dengan luas wilayah sebesar 153.443,9 km² (lihat Tabel 1.5). Wilayah ini berbatasan dengan Kalimantan Barat di sebelah barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur di bagian timur dan selatan, serta Kalimantan Utara di utara. Kondisi geografisnya ditandai oleh bentang alam yang luas dengan hutan tropis, rawa gambut, dan sungai-sungai besar yang menjadi ciri khas daerah ini. Terdapat 11 sungai utama dan lebih dari 30 anak sungai, di antaranya Sungai Barito yang panjangnya mencapai ±900 km dan dapat dilayari hingga 700 km.

Gambar 1.2 Peta Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
 Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2024, BPS Provinsi Kalimantan Tengah



Topografi wilayah sebagian besar berupa dataran rendah dengan rawa dan hutan gambut, sementara di bagian timur terdapat pegunungan yang menjadi batas alami dengan provinsi tetangga. Iklim Kalimantan Tengah bersifat tropis dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun, mendukung keanekaragaman hayati sekaligus menjadikan daerah ini kaya akan sumber daya alam. Letak dan kondisi geografis tersebut memberikan Kalimantan Tengah peran penting sebagai kawasan penyangga ekologi sekaligus pusat pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam di Kalimantan.

Tabel 1.5 Luas Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten/ Kota	Luas (km2)	Persentase Terhadap Luas Provinsi
1	Kab. Kotawaringin Barat	Pangkalan Bun	9,480.3	6.18%
2	Kab. Kotawaringin Timur	Bengkayang	15,543.8	10.13%
3	Kab. Kapuas	Sampit	17,033.6	11.10%
4	Kab. Barito Selatan	Buntok	6,267.1	4.08%
5	Kab. Barito Utara	Muara Teweh	9,984.8	6.51%
6	Kab. Sukamara	Sukamara	3,311.2	2.16%
7	Kab. Lamandau	Nanga Bulik	7,632.4	4.97%
8	Kab. Seruyan	Kuala Pembuang	15,215.2	9.92%
9	Kab. Katingan	Kasongan	20,382.3	13.28%
10	Kab. Pulang Pisau	Pulang Pisau	9,650.9	6.29%
11	Kab. Gunung Mas	Kuala Kurun	9,305.8	6.06%
12	Kab. Barito Timur	Tamiang Layang	3,212.5	2.09%
13	Kab. Murung Raya	Puruk Cahu	23,575.3	15.36%
14	Kota Palangka Raya	Palangka Raya	2,848.7	1.86%
Kalimantan Tengah		Palangka Raya	153,443.9	100.00%

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2024, BPS Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan data yang disajikan dari BPS Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat dilihat pada Tabel 1.6, data tahun 2024 menunjukkan 83.02% Rumah Tangga di Provinsi Kalimantan Tengah menempati tempat tinggal di bangunan milik sendiri, 3.00% tempat tinggal berupa Kontrak/Sewa, 7.92% Bebas Sewa, dan tempat tinggal Dinas/Lainnya sebesar 6.05%.

Tabel 1.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Milik Sendiri	Kontrak/ Sewa	Bebas Sewa	Dinas/ Lainnya	Jumlah
1	Kab. Kotawaringin Barat	86.31	1.59	7.48	4.62	100.00
2	Kab. Kotawaringin Timur	75.42	1.64	7.58	15.36	100.00
3	Kab. Kapuas	85.38	2.80	10.99	NA	100.00
4	Kab. Barito Selatan	93.06	NA	5.40	0.83	100.00
5	Kab. Barito Utara	86.10	4.84	8.39	0.67	100.00
6	Kab. Sukamara	83.23	NA	7.11	8.26	100.00
7	Kab. Lamandau	86.26	6.54	5.87	1.33	100.00
8	Kab. Seruyan	69.97	NA	5.79	23.99	100.00
9	Kab. Katingan	91.04	2.21	6.05	NA	100.00
10	Kab. Pulang Pisau	92.64	NA	6.87	NA	100.00
11	Kab. Gunung Mas	85.08	4.03	8.15	2.73	100.00
12	Kab. Barito Timur	94.43	2.36	2.94	NA	100.00
13	Kab. Murung Raya	91.17	2.40	3.63	2.80	100.00
14	Kota Palangka Raya	74.17	10.52	14.00	1.31	100.00
Kalimantan Tengah		83.02	3.00	7.92	6.05	100.00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah 2024, BPS Kalimantan Tengah

Tabel 1.7 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota, Kepemilikan, dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Ada Fasilitas				Tidak Ada Fasilitas	Jumlah
		Digunakan Sendiri	Digunakan Bersama Rumah Tangga Tertentu	MCK Komunal, MCK Umum	Tidak Menggunakan		
1	Kab. Kotawaringin Barat	97.17	1.93	NA	-	0.86	100.00
2	Kab. Kotawaringin Timur	92.03	6.56	1.32	-	NA	100.00
3	Kab. Kapuas	81.47	13.34	3.67	-	1.52	100.00
4	Kab. Barito Selatan	72.62	5.01	20.45	-	NA	100.00
5	Kab. Barito Utara	88.27	NA	6.45	NA	4.28	100.00
6	Kab. Sukamara	94.25	2.60	2.88	-	NA	100.00
7	Kab. Lamandau	87.44	2.46	3.36	-	6.75	100.00
8	Kab. Seruyan	85.28	2.44	7.31	NA	4.96	100.00
9	Kab. Katingan	94.66	2.44	2.13	-	NA	100.00
10	Kab. Pulang Pisau	89.99	4.05	1.66	-	4.30	100.00
11	Kab. Gunung Mas	87.29	7.82	3.66	-	1.24	100.00
12	Kab. Barito Timur	95.18	1.25	1.85	-	1.72	100.00
13	Kab. Murung Raya	77.90	10.65	7.75	-	3.69	100.00
14	Kota Palangka Raya	96.10	2.04	NA	-	NA	100.00
Kalimantan Tengah		89.38	5.07	3.72	NA	1.82	100.00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah 2024, BPS Kalimantan Tengah

Berdasarkan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar (lihat Tabel 1.7), Sebanyak 89.38% Rumah Tangga di Provinsi Kalimantan Barat menggunakan jamban milik sendiri, 5.07% menggunakan jamban secara bersama, 3.72% merupakan MCK Komunal / Umum, serta 1.82% tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar.

Tabel 1.8 *Backlog* Perumahan Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Backlog Kepemilikan	Backlog Kualitas	Total Backlog Perumahan
1	KAB. KAPUAS	11,301	38,588	49,889
2	KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	13,996	25,523	39,519
3	KAB. KOTAWARINGIN BARAT	10,256	10,159	20,415
4	KAB. KATINGAN	4,116	15,503	19,619
5	KAB. SERUYAN	7,661	11,198	18,859
6	KAB. BARITO SELATAN	4,107	12,995	17,102
7	KAB. BARITO UTARA	4,396	12,342	16,738
8	KAB. MURUNG RAYA	2,671	13,702	16,373
9	KAB. PULANG PISAU	3,990	11,274	15,264
10	KOTA PALANGKARAYA	9,318	5,614	14,932
11	KAB. GUNUNG MAS	3,667	10,325	13,992
12	KAB. BARITO TIMUR	1,995	8,895	10,890
13	KAB. LAMANDAU	3,344	6,328	9,672
14	KAB. SUKAMARA	2,041	2,907	4,948
Total		82,859	185,353	268,212

Sumber: *Dashboard MyPKP*

Berdasarkan Tabel 1.8, total *backlog* perumahan Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 268.212 unit, terdiri atas 82.859 unit *backlog* kepemilikan dan 185.353 unit *backlog* kualitas. Permasalahan didominasi oleh *backlog* kualitas ($\pm 69\%$), menunjukkan kebutuhan peningkatan rumah layak huni lebih mendesak dibanding akses kepemilikan. *Backlog* terbesar terdapat di Kabupaten Kapuas (49.889 unit) dan Kotawaringin Timur (39.519 unit), dengan dominasi *backlog* kualitas yang signifikan. Sementara itu, Kota Palangkaraya (14.932 unit) menunjukkan komposisi *backlog* kepemilikan yang relatif lebih tinggi dibanding kualitas, mencerminkan tekanan kebutuhan hunian di wilayah perkotaan.

Secara umum, dari beberapa tabel yang sudah disajikan dapat diambil suatu kesimpulan bahwa data tersebut menunjukkan karakter wilayah yang masih bercorak semi-rural dengan tingkat kepemilikan rumah relatif tinggi dibandingkan wilayah metropolitan nasional. Namun demikian, terdapat sekitar 16–17% rumah tangga yang belum menempati rumah milik sendiri, baik dalam status kontrak/sewa, bebas sewa, maupun rumah dinas/lainnya. Angka ini mengindikasikan adanya tekanan *backlog* kepemilikan yang cukup signifikan, terutama di wilayah perkotaan dan kawasan berbasis industri. Kota-kota dengan aktivitas ekonomi tinggi menunjukkan proporsi sewa dan hunian dinas yang lebih besar, yang mencerminkan mobilitas tenaga kerja serta keterbatasan akses kepemilikan rumah bagi kelompok berpenghasilan menengah bawah (MBR).

Di sisi lain, kabupaten dengan persentase kepemilikan tinggi belum tentu bebas dari persoalan perumahan. Pada wilayah rural, kepemilikan rumah sering kali tidak berbanding lurus dengan kualitas hunian. Kepemilikan yang tinggi dapat tetap disertai permasalahan rumah tidak layak huni (RTLH), keterbatasan prasarana dasar, dan legalitas aset yang belum kuat. Dengan demikian, persoalan perumahan di Kalimantan Tengah bukan semata-mata soal akses kepemilikan, tetapi juga menyangkut peningkatan kualitas dan keberlanjutan hunian.

Merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2029, dapat dirangkum beberapa aspirasi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hunian layak, layanan publik, dan regulasi di wilayah Kalimantan Tengah.

1) Aspirasi Pemenuhan Kebutuhan Hunian Layak

Masyarakat Kalimantan Tengah memiliki aspirasi terhadap peningkatan akses hunian yang layak, aman, terjangkau, dan inklusif, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Aspirasi ini tercermin dalam kebutuhan akan penyediaan perumahan yang terintegrasi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), serta didukung oleh akses air minum, sanitasi, dan infrastruktur permukiman yang memadai.

Selain itu, masyarakat mengharapkan adanya kebijakan pembiayaan perumahan yang lebih adaptif, termasuk bauran pendanaan dan kemudahan akses pembiayaan, guna meningkatkan keterjangkauan perumahan di tengah kenaikan harga lahan dan rumah.

2) Aspirasi terhadap Layanan Publik Permukiman

Masyarakat Kalimantan Tengah mengharapkan pemerataan akses layanan publik, terutama layanan infrastruktur permukiman, air minum, sanitasi, dan persampahan. Aspirasi ini muncul

sebagai respons terhadap kondisi belum meratanya akses pelayanan publik dan keterbatasan kualitas layanan yang tersedia.

Dalam konteks transformasi digital, masyarakat juga mengharapkan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi yang lebih optimal, sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif, efisien, dan inklusif.

3) Aspirasi terhadap Regulasi dan Tata Kelola

Dalam aspek regulasi, masyarakat Kalimantan Tengah mengharapkan sistem regulasi yang efektif, sinkron, dan partisipatif. Kondisi hiper regulasi maupun kekurangan regulasi yang ada dinilai berpotensi menghambat pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, masyarakat mengharapkan penguatan kualitas regulasi serta peningkatan partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan.

Selain itu, masyarakat juga mengharapkan adanya regulasi yang mempermudah proses penyediaan perumahan, termasuk kemudahan perizinan dan penyusunan kebijakan yang mendukung peningkatan akses hunian layak.

1.1.2. Capaian Kinerja Periode 2020-2023

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I melalui Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 2020 – 2023 telah melaksanakan pembangunan bidang perumahan melalui program bantuan rumah susun, program bantuan rumah khusus, bantuan PSU dan program peningkatan kualitas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Persentase nilai capaian kinerja sangat dipengaruhi oleh realisasi atas alokasi anggaran yang tersedia di dalam DIPA Satuan Kerja tahun berjalan yang menjadi dasar penyusunan target Perjanjian Kinerja. Adapun perbandingan capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.9 Capaian Kinerja Tahun 2020-2023 Terhadap Perjanjian Kinerja (BP2P Kalimantan I)

KEGIATAN	SATUAN	2020			2021			2022			2023		
		TARGET (UNIT)	REALISASI		TARGET (UNIT)	REALISASI		TARGET (UNIT)	REALISASI		TARGET (UNIT)	REALISASI	
			UNIT	%		UNIT	%		UNIT	%		UNIT	%
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
Kegiatan: Penyediaan Akses Perumahan Yang Layak Dan Aman													
Perencanaan penyediaan perumahan	Laporan	6	6	100%	3	3	100%	5	5	100%	5	5	100%
Jumlah rumah MBR yang mendapat fasilitasi layanan bantuan PSU	Unit	-	-	-	1.688	1.688	100%	1.173	1.173	100%	2.115	2.396	112,29
Jumlah bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya	Unit	14.000	13.999	99,99%	10.547	10.547	100%	7.430	7.412	99,76%	9.172	9.172	99,76%
Jumlah rumah khusus yang dibangun	Unit	-	-	-	49	49	100%	5	5	100%	6	6	100%
Jumlah rumah khusus yang dipelihara dan dirawat	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah rumah susun yang dibangun	Unit	-	-	-	431	435	100,9%	99	99	100%	193	193	100%
Jumlah rumah susun yang dipelihara dan dirawat	Tower	-	-	-	-	-	-	4	4	100%	-	-	-
Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN													
Kegiatan: Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan													
Jumlah layanan sarana dan prasarana internal	Layanan	2	2	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
Jumlah layanan dukungan manajemen satker	Layanan	2	2	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
Jumlah layanan perkantoran	Layanan	2	2	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%

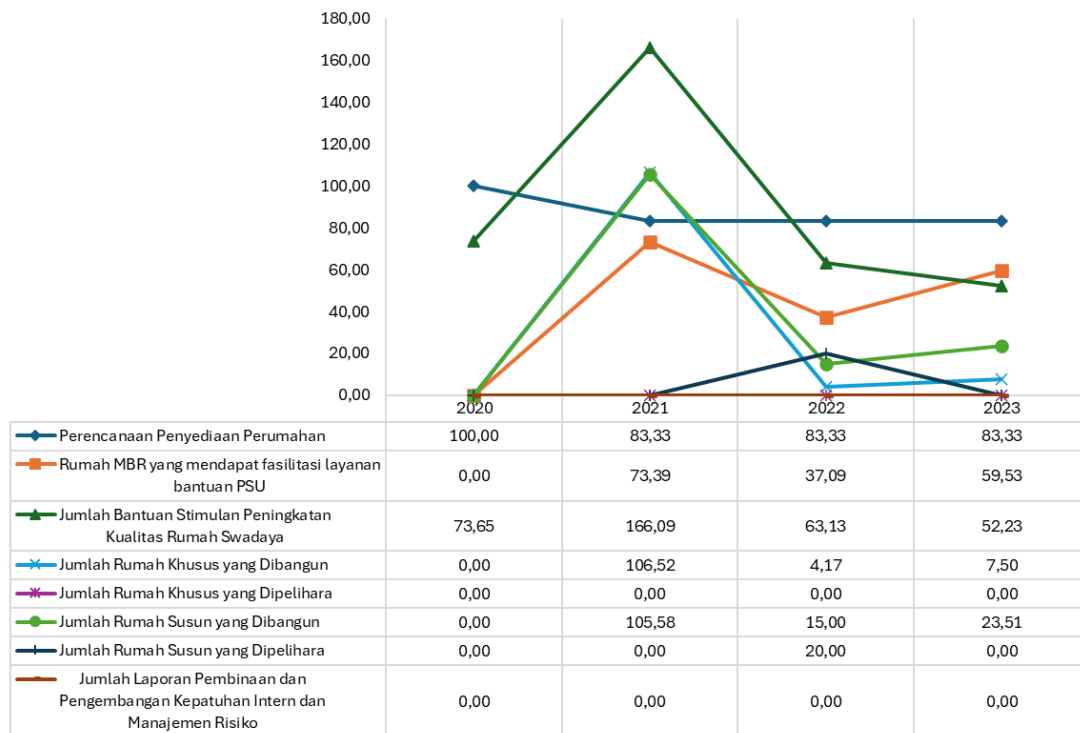
Sumber : LAKIP Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Tahun 2024

Hasil kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I selama tahun 2020 hingga 2023 akan dibandingkan dengan target Renstra pada tabel berikut sehingga diketahui gap dan capaian paruh waktu Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I.

Tabel 1.10 Capaian Kinerja Tahun 2020-2023 Terhadap Target 2020-2023 pada Renstra BP2P Kalimantan I)

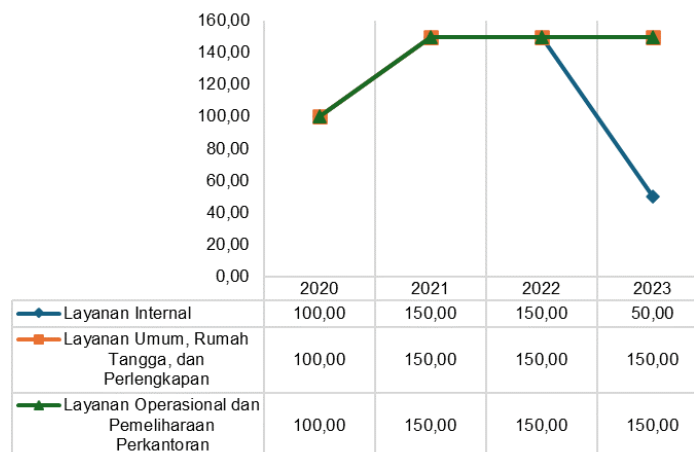
KEGIATAN	SATUAN	2020		2021		2022		2023		Total	
		Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Tar-get	Realisasi
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
Kegiatan: Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman											
1. Jumlah laporan penyusunan perencanaan penyediaan perumahan	Laporan	6	6	6	5	6	5	6	5	24	21
2. Jumlah rumah MBR yang mendapat fasilitasi layanan bantuan PSU	Unit	0	0	2.300	1.688	3.163	1.173	4.025	2.396	9.488	5.257
3. Jumlah bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya	Unit	19.008	13.999	6.350	10.547	11.740	7.412	17.560	9.172	54.658	41.130
4. Jumlah rumah khusus yang dibangun	Unit	0	0	46	49	120	5	80	6	246	66
5. Jumlah rumah khusus yang dipelihara	Unit	0	0	0	0	70	0	0	0	70	0
6. Jumlah rumah susun yang dibangun	Unit	0	0	412	435	660	99	821	193	1.893	727
7. Jumlah rumah susun yang dipelihara	Tower	0	0	6	0	20	4	22	0	48	46
8. Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN											
Kegiatan: Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan											
1. Jumlah layanan internal	Layanan	2	2	2	3	2	3	2	1	8	9
2. Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan	Layanan	2	2	2	3	2	3	2	3	8	11
3. Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Layanan	2	2	2	3	2	3	2	3	8	11

Sumber : LAKIP Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Tahun 2024



Gambar 1.3 Grafik Persentase Capaian Kinerja 2020-2023 Terhadap Renstra BP2P Kalimantan I (Program Perumahan dan Kawasan Permukiman)

Berdasarkan Gambar 1.3 dapat dilihat dalam rentang waktu 2020 hingga 2023 indikator Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya pada tahun 2020 memiliki capaian hanya 73.65% terhadap target renstra. Namun pada tahun 2021, capaian indikator kegiatan tersebut mencapai angka 166.09%, di mana posisi ini merupakan capaian tertinggi dibandingkan dengan indikator kegiatan lainnya. Sedangkan capaian terendah ada pada indikator kegiatan Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko pada rentang tahun 2020 hingga 2023. Hal ini disebabkan karena tidak ditetapkannya angka target pada renstra. Apabila dilihat secara keseluruhan, tren yang terbentuk dari tahun 2020 mengalami kenaikan pada tahun 2021, kemudian turun pada tahun 2022 dan berlanjut hingga 2023.



Gambar 1.4 Grafik Persentase Capaian Kinerja 2020-2023 Terhadap Renstra BP2P Kalimantan I (Program Dukungan Manajemen)

Berdasarkan Gambar 1.4 dapat dilihat dalam rentang waktu 2020 hingga 2023 semua indikator kegiatan pada Program Dukungan Manajemen secara keseluruhan memiliki capaian yang optimal terhadap target renstra. Pada tahun 2020 seluruh indikator kinerja memiliki capaian maksimal 100% terhadap target, kemudian mengalami tren kenaikan capaian hingga 150% pada tahun 2021 dan konstan hingga tahun 2023. Namun tren penurunan capaian terlihat pada indikator kegiatan Layanan Internal, di mana pada tahun 2023, capaian hanya 50% terhadap target yang ditetapkan dalam renstra.

Adapun selisih antara target Renstra dan realisasi kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I akan dijabarkan per tahun sesuai data di atas pada tabel berikut ini:

Tabel 1.11 Selisih Target Capaian Kinerja Tahun 2020-2023 Terhadap Renstra BP2P Kalimantan I

KEGIATAN	SATUAN	2020		2021		2022		2023		Total	
		Seli-sih	%	Seli-sih	%	Seli-sih	%	Seli-sih	%	Seli-sih	%
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
Kegiatan: Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman											
1. Perencanaan penyediaan perumahan	Dokumen	0	0	-1	-16,67	-1	-16,67	-1	-16,67	-3	-12,50
2. Rumah MBR yang mendapat fasilitasi layanan bantuan PSU	Unit	0	0	-612	-26,61	-1.990	-62,91	-1.629	-40,47	-2.602	-44,59
3. Bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya	Unit	-5.009	-26,35	4.197	66,09	-4.328	-36,87	-8.388	-47,77	-13.528	-24,75
4. Rumah khusus yang dibangun	Unit	0	0	3	6,52	-115	-95,83	-74	-92,50	-112	-67,47
5. Rumah khusus yang dipelihara dan dirawat	Unit	0	0	0	0	-70	-100	0	100	-70	-100
6. Rumah susun yang dibangun	Unit	0	0	23	5,58	-561	-85,00	-628	-76,49	-1.166	-61,60
7. Rumah susun yang dipelihara dan dirawat	Tower	0	0	-6	-100	-16	-80,00	-22	0	-22	-84,62
8. Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	Laporan	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN											
Kegiatan: Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan											
1. Layanan internal	Layanan	0	0	1	50,00	1	50,00	-1	-50,00	1	11,25
2. Layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan	Layanan	0	0	1	50,00	1	50,00	1	50,00	3	37,50
3. Layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Layanan	0	0	1	50,00	1	50,00	1	50,00	3	37,50

Sumber : LAKIP Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Tahun 2024

Dari 11 (sebelas) kegiatan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I, terdapat 3 (tiga) kegiatan yang target kinerjanya terpenuhi yakni Layanan internal; Layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan; serta Layanan operasional dan pemeliharaan kantor. Ketiganya merupakan bagian dari Program Dukungan Manajemen.

Terdapat 6 (enam) kegiatan yang tren capaian kinerjanya menurun setiap tahun, yakni Perencanaan penyediaan perumahan; Rumah MBR yang mendapat fasilitasi PSU; Rumah khusus yang dibangun; Rumah khusus yang dipelihara dan dirawat; Rumah susun yang dibangun; serta Rumah susun yang dipelihara dan dirawat.

Kegiatan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko mulai diterapkan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I pada tahun 2023. Capaian realisasi kegiatan ini tidak dapat dihitung karena tidak terdapat dalam Rencana Strategis 2020-2024. Apabila dilihat dari sisi manfaat, maka Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I berhasil membangun sebanyak 47.179 unit rumah, yang apabila diasumsikan satu unit rumah dihuni oleh 4 (empat) orang, maka sejumlah 188.716 orang di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah telah merasakan langsung manfaat pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I.

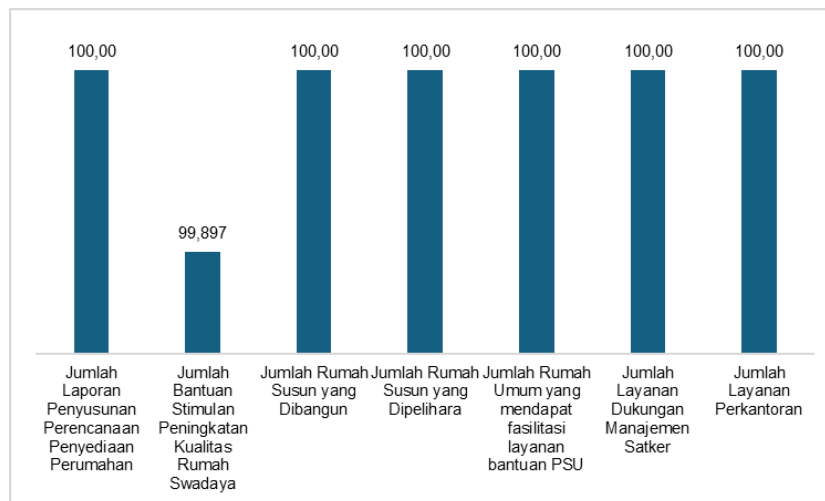
1.1.3. Capaian Kinerja Periode 2024

Pada periode sebelumnya, yaitu Direktorat Jenderal Perumahan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada akhir tahun 2024 telah disepakati hasil capaian kinerja untuk Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat (lihat Tabel 1.12), dan hasil capaian kinerja untuk Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Tengah (lihat Tabel 1.13). Capaian Kinerja tersebut merujuk pada target Perjanjian Kinerja Revisi Akhir, yang kemudian digunakan dalam pembahasan pada laporan kinerja ini.

Tabel 1.12 Capaian Output Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	Laporan	1	1	100%
Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	8.764	8.755	99,89%
Jumlah Rumah Susun yang dibangun	Unit	144	144	100%
Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	Tower	4	4	100%
Jumlah Rumah Umum yang mendapat fasilitasi layanan bantuan PSU	Unit	524	524	100%
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	100%
Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100%

Sumber : LAKIP Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Tahun 2024



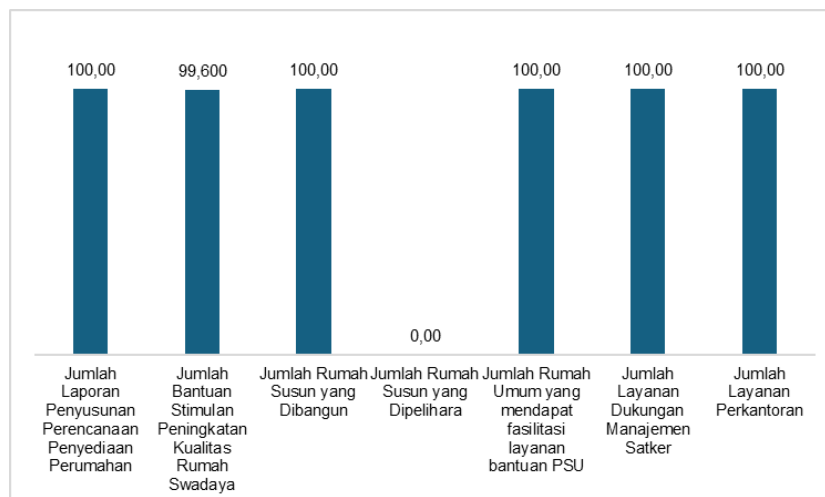
Gambar 1.5 Grafik Capaian Tahun 2024 terhadap PK Akhir Satker PP Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan Tabel 1.12 dan Gambar 1.5 Satker Penyediaan Perumahan provinsi Kalimantan Barat menetapkan target sejumlah 8.764 Unit untuk tahun 2024 pada indikator Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya. Capaian Kinerja untuk target tersebut yaitu sejumlah 8.755 Unit dari target yang telah ditetapkan. Enam dari tujuh indikator kegiatan memiliki capaian maksimal 100%, namun 1 indikator kegiatan yaitu Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualtias Rumah Swadaya memiliki capaian 99.897% pada tahun 2024.

Tabel 1.13 Capaian Output Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	Laporan	1	1	100%
Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	500	498	99.60%
Jumlah Rumah Susun yang dibangun	Unit	87	87	100%
Jumlah Rumah Umum yang mendapat fasilitasi layanan bantuan PSU	Unit	63	63	100%
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	100%
Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100%

Sumber : LAKIP Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Tahun 2024



Gambar 1.6 Grafik Capaian Tahun 2024 terhadap PK Akhir Satker PP Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan Tabel 1.13 dan Gambar 1.6 Satker Penyediaan Perumahan provinsi Kalimantan Tengah menetapkan target sejumlah 500 Unit untuk tahun 2024 pada indikator Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dengan Capaian Kinerja untuk target tersebut yaitu sejumlah 498 Unit atau sebesar 99.60% dari target yang telah ditetapkan. Selain indikator kegiatan tersebut, indikator kegiatan lainnya memiliki capaian kinerja 100%, terkecuali pada indikator Jumlah Rumah Susun yang Dipelihara karena dalam renstra tidak ditetapkan dan juga tidak memiliki realisasi.

1.2. POTENSI PERMASALAHAN

Identifikasi potensi dan permasalahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman menjadi langkah awal dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang tepat. Kementerian PKP, dalam hal ini BP3KP Kalimantan I harus bergerak secara cepat dan optimal dengan memanfaatkan potensi untuk menghadapi permasalahan yang ada. Berikut ini merupakan potensi dan permasalahan dengan pembahasan berdasarkan wilayah kerja yaitu Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah

1.2.1. POTENSI

Merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, disebutkan beberapa potensi berkaitan dengan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang dapat dilihat pada Tabel 1.14 dan Tabel 1.15.

Tabel 1.14 Potensi di wilayah Kalimantan Barat berkaitan dengan bidang perumahan dan kawasan permukiman

Wilayah Kalimantan Barat		
No.	Aspek	Uraian Potensi
1	Kebijakan dan Program Perumahan	Tersedianya kebijakan dan program pembangunan perumahan yang diarahkan pada penyediaan hunian layak, terjangkau, dan inklusif, termasuk program pengembangan perumahan, penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), relokasi, dan pengurangan <i>backlog</i> perumahan.
2	Pengembangan Kawasan Permukiman	Adanya program penataan kawasan permukiman dan penanganan kawasan kumuh secara bertahap, serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) sebagai prioritas pembangunan permukiman.
3	Peningkatan Infrastruktur Dasar	Peluang pengembangan infrastruktur dasar permukiman, meliputi air bersih, sanitasi, drainase, dan akses layanan publik, guna meningkatkan kualitas lingkungan hunian dan kesejahteraan masyarakat.
4	Pengelolaan Sanitasi dan Air Limbah	Penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan air limbah regional sebagai dasar peningkatan akses sanitasi aman, serta

		potensi integrasi pembangunan sanitasi dengan pengembangan kawasan permukiman.
5	Penguatan Pendanaan dan Kolaborasi	Peluang penguatan kolaborasi pendanaan melalui skema KPDBU, CSR, dan sumber pembiayaan alternatif, serta sinergi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan dalam pembangunan perumahan dan permukiman.
6	Pengendalian Tata Ruang dan Lingkungan	Potensi penguatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui sinkronisasi RTRW dengan implementasi teknis di lapangan, serta penerapan prinsip pembangunan permukiman berkelanjutan dan ramah lingkungan.
7	Peningkatan Kualitas Layanan Publik	Peluang integrasi pengembangan kawasan permukiman dengan pusat kegiatan ekonomi dan layanan publik untuk menciptakan lingkungan hunian yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing.

Tabel 1.15 Potensi di wilayah Kalimantan Tengah berkaitan dengan bidang perumahan dan kawasan permukiman

Wilayah Kalimantan Tengah		
No.	Aspek	Uraian Potensi
1	Ketersediaan Lahan dan Pengembangan Wilayah	Ketersediaan lahan yang relatif luas memberikan peluang pengembangan kawasan hunian dan permukiman baru yang terencana, terutama pada wilayah pengembangan strategis dan kawasan perkotaan baru.
2	Kebijakan dan Perencanaan Perumahan	Adanya arah kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman dalam RPJMD serta dokumen perencanaan sektoral menjadi landasan pengembangan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
3	Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Peluang peningkatan kualitas permukiman melalui pembangunan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), termasuk jalan lingkungan, drainase, air minum, dan sanitasi.
4	Program Penanganan Kawasan Kumuh	Tersedianya program penanganan kawasan kumuh secara terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
5	Penguatan Sistem Sanitasi	Peluang pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik dan persampahan melalui pendekatan kawasan, regional, dan berbasis masyarakat.
6	Dukungan Pendanaan dan Kolaborasi	Potensi optimalisasi pembiayaan pembangunan perumahan dan permukiman melalui sinergi APBD, APBN, dana desa, sektor swasta, dan skema pembiayaan alternatif.
7	Pengembangan Permukiman Berbasis Tata Ruang	Peluang integrasi pembangunan perumahan dan permukiman dengan rencana tata ruang wilayah untuk mewujudkan pola permukiman yang tertata, aman, dan berkelanjutan.
8	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Pengembangan perumahan dan permukiman menjadi instrumen strategis dalam peningkatan kualitas hidup, pengurangan kemiskinan, dan penguatan daya saing wilayah.

Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah memiliki potensi yang signifikan dalam pengembangan hunian, perumahan, kawasan permukiman, dan sistem sanitasi, yang ditopang oleh ketersediaan lahan yang relatif luas, struktur ruang wilayah yang berkembang, serta arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung penguatan sektor perumahan dan permukiman sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur dasar.

Ketersediaan ruang wilayah memberikan peluang bagi pengembangan kawasan hunian baru yang terencana, sekaligus mendukung penataan kawasan permukiman eksisting. Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan sektoral yang selaras dengan kebijakan nasional menjadi landasan strategis dalam pengembangan perumahan yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Program penanganan kawasan kumuh, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, serta pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) menunjukkan potensi peningkatan kualitas lingkungan permukiman secara bertahap dan terintegrasi.

Dalam aspek sanitasi, terdapat peluang pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik dan persampahan melalui pendekatan kawasan, regional, dan berbasis masyarakat, yang dapat diintegrasikan dengan pengembangan kawasan permukiman. Selain itu, potensi penguatan kolaborasi pendanaan melalui sinergi APBD, APBN, dana desa, serta keterlibatan sektor swasta dan skema pembiayaan inovatif membuka peluang percepatan pembangunan perumahan dan permukiman.

Integrasi pembangunan perumahan dan permukiman dengan kebijakan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang menjadi faktor strategis dalam mewujudkan pola permukiman yang tertata, aman, dan berwawasan lingkungan. Dengan memanfaatkan keunggulan spasial, dukungan kebijakan pembangunan, serta kolaborasi lintas sektor, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah memiliki modal dasar yang kuat untuk mewujudkan sistem hunian dan permukiman yang inklusif, layak, dan berkelanjutan, guna mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing wilayah.

1.2.2. PERMASALAHAN

Pembahasan mengenai permasalahan ataupun tantangan khususnya dalam konteks bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dituangkan ke dalam dua bagian sesuai wilayah kerja BP3KP Kalimantan I, yang meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah.

A. Wilayah Kalimantan Barat

Merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, disebutkan capaian Perumahan dan Kawasan permukiman Provinsi Kalimantan Barat selama Tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan keberhasilan dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak bencana,

khususnya dalam penyediaan rumah layak huni. Meskipun capaian ini positif, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi tantangan utama, antara lain:

Tabel 1.16 Permasalahan di wilayah Kalimantan Barat berkaitan dengan bidang perumahan dan kawasan permukiman

Wilayah Kalimantan Barat		
No.	Aspek	Uraian Permasalahan
1	Kualitas Hunian dan Perumahan	Kualitas perumahan dan hunian belum memenuhi standar teknis, kesehatan, dan keselamatan, terutama dari aspek ketahanan bangunan, luas hunian, akses air minum, sanitasi, dan keamanan bermukim.
2	Kawasan Kumuh dan Kepadatan Permukiman	Keberadaan kawasan kumuh masih signifikan dan belum mencapai target pengurangan sesuai kebijakan nasional. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan lahan, sehingga mendorong berkembangnya permukiman tidak teratur, berkepadatan tinggi, dan minim infrastruktur dasar.
3	<i>Backlog</i> Perumahan	Tingginya <i>backlog</i> perumahan yaitu sebesar 552.937 unit akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah, kenaikan harga lahan dan hunian, serta keterbatasan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
4	Sanitasi dan Air Limbah	Sistem pengelolaan air limbah domestik belum optimal; sebagian besar limbah rumah tangga dibuang langsung ke saluran drainase tanpa pengolahan. Rendahnya ketersediaan fasilitas sanitasi layak (MCK/jamban sehat) dan rendahnya capaian akses air limbah domestik aman masih menjadi persoalan utama.
5	Pendanaan Pembangunan	Ketergantungan pembiayaan pembangunan perumahan dan permukiman pada APBD dengan keterbatasan kapasitas fiskal daerah, serta belum optimalnya pemanfaatan sumber pendanaan alternatif (CSR, KPDBU, dana desa, dan sektor swasta).
6	Kelembagaan dan Tata Kelola	Fragmentasi kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penanganan kawasan kumuh dan permukiman, serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Ketersediaan data dan sistem informasi perumahan dan permukiman yang terintegrasi masih terbatas.
7	Tata Ruang dan Lingkungan	Tumpang tindih pemanfaatan ruang, lemahnya pengawasan tata ruang, serta dampak perubahan iklim dan alih fungsi lahan yang memperburuk kualitas lingkungan permukiman.
8	Sosial Ekonomi Masyarakat	Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dan keterbatasan akses pembiayaan perumahan mendorong terjadinya hunian tidak layak, hunian padat, dan fenomena multi-keluarga dalam satu rumah.

Tabel 1.17 Permasalahan di wilayah Kalimantan Tengah berkaitan dengan bidang perumahan dan kawasan permukiman

Wilayah Kalimantan Tengah		
No.	Aspek	Uraian Permasalahan
1	Kualitas Hunian	Sebagian hunian belum memenuhi standar teknis dan kesehatan, ditandai dengan keberadaan rumah tidak layak huni, kepadatan bangunan, serta keterbatasan akses terhadap prasarana dasar.
2	Backlog dan Keterjangkauan Perumahan	Tingginya <i>backlog</i> perumahan yaitu sebesar 268.212 unit dan keterbatasan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), menyebabkan kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan hunian layak.
3	Kawasan Kumuh	Keberadaan kawasan kumuh perkotaan dan perdesaan masih menjadi persoalan struktural, dipengaruhi oleh urbanisasi, pertumbuhan penduduk, dan lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang.
4	Akses Infrastruktur Permukiman	Keterbatasan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman, termasuk air minum layak, drainase, dan jaringan jalan lingkungan.
5	Sanitasi dan Pengelolaan Air Limbah	Sistem pengelolaan air limbah domestik belum optimal; sebagian masyarakat masih menggunakan sistem sanitasi tidak layak, serta rendahnya cakupan layanan sanitasi aman.
6	Pengelolaan Persampahan	Kinerja pengelolaan persampahan belum optimal, ditandai dengan keterbatasan fasilitas, rendahnya partisipasi masyarakat, dan belum optimalnya penerapan prinsip <i>reduce, reuse, recycle</i> (3R).
7	Pendanaan dan Kapasitas Fiskal	Keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam pembiayaan pembangunan perumahan dan permukiman, serta belum optimalnya pemanfaatan sumber pendanaan non-pemerintah.
8	Tata Kelola dan Kelembagaan	Koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan dalam penanganan perumahan dan permukiman belum optimal, serta keterbatasan data dan sistem informasi sektoral yang terintegrasi.
9	Tekanan Lingkungan dan Risiko Bencana	Kerentanan kawasan permukiman terhadap banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta degradasi lingkungan yang berdampak pada kualitas hunian dan keberlanjutan permukiman.
10	Ketimpangan Antarwilayah	Disparitas kualitas perumahan dan permukiman antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih tinggi, mencerminkan ketimpangan akses layanan dasar dan infrastruktur.

Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah masih menghadapi berbagai permasalahan struktural dalam penyelenggaraan hunian, perumahan, kawasan permukiman, dan sanitasi, yang tercermin pada kesenjangan antara kebutuhan hunian layak dengan ketersediaan perumahan, kualitas lingkungan permukiman, serta keterjangkauan akses terhadap infrastruktur dasar. Secara umum, kualitas hunian di kedua provinsi belum sepenuhnya memenuhi standar teknis, kesehatan, dan keselamatan bangunan. Keberadaan rumah tidak layak huni, kepadatan bangunan di kawasan tertentu, serta keterbatasan akses terhadap air minum layak, sanitasi, dan

prasarana dasar permukiman masih menjadi persoalan utama. Tingginya *backlog* perumahan dan keterbatasan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), memperkuat kesenjangan akses terhadap hunian layak dan terjangkau.

Permasalahan kawasan kumuh masih signifikan, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, urbanisasi, keterbatasan pengendalian pemanfaatan ruang, serta lemahnya penyediaan infrastruktur permukiman. Ketimpangan kualitas perumahan dan permukiman antarwilayah, terutama antara kawasan perkotaan dan perdesaan, menunjukkan belum meratanya akses layanan dasar dan infrastruktur permukiman.

Dalam aspek sanitasi, sistem pengelolaan air limbah domestik dan persampahan belum optimal. Rendahnya cakupan layanan sanitasi aman, keterbatasan fasilitas pengolahan air limbah, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan berdampak pada degradasi kualitas lingkungan permukiman. Kondisi tersebut diperparah oleh kerentanan wilayah terhadap risiko lingkungan dan bencana, seperti banjir dan degradasi lahan, yang berdampak langsung pada keberlanjutan kawasan permukiman.

Dari sisi pendanaan dan tata kelola, keterbatasan kapasitas fiskal daerah, ketergantungan pada pembiayaan pemerintah, serta belum optimalnya pemanfaatan sumber pendanaan alternatif menjadi kendala dalam percepatan pembangunan perumahan dan permukiman. Koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan yang belum optimal, serta keterbatasan data dan sistem informasi perumahan dan permukiman yang terintegrasi, turut menghambat efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Dengan demikian, permasalahan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya penguatan kebijakan, peningkatan kualitas tata kelola, percepatan pembangunan infrastruktur dasar permukiman, serta optimalisasi pembiayaan dan kolaborasi lintas sektor, guna mewujudkan sistem perumahan dan permukiman yang layak, inklusif, dan berkelanjutan.

1.2.3. MATRIKS S-W-O-T DALAM MENGHADAPI PELAKSANAAN PROGRAM

Pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah dipengaruhi oleh karakteristik wilayah yang luas, sebaran penduduk yang tidak merata, serta dinamika pertumbuhan kawasan perkotaan dan perdesaan. Ketersediaan lahan yang relatif luas dan dukungan kebijakan pembangunan menjadi potensi utama, namun masih dihadapkan pada permasalahan *backlog* perumahan, kualitas hunian yang belum memadai, keterbatasan layanan dasar permukiman, serta risiko lingkungan pada wilayah rawa dan gambut.

Dalam konteks tersebut, matriks SWOT merupakan hasil identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memengaruhi pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman. Matriks ini dapat menjadi dasar dalam perumusan strategi, arah kebijakan, dan prioritas program pembangunan yang adaptif terhadap karakteristik wilayah dan kebutuhan

masyarakat, khususnya dalam konteks wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang dapat dilihat pada Tabel 1.18.

Tabel 1.18 Matriks SWOT dalam Pelaksanaan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam konteks di Wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah

STRENGTHS (S)
S1. Ketersediaan lahan yang relatif luas untuk pengembangan perumahan dan permukiman.
S2. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang (RPJMD, RTRW, RDTR, RP3KP, RISPAM, SSK).
S3. Dukungan kebijakan dan program pemerintah pusat dan daerah.
S4. Potensi kolaborasi dengan sektor swasta, BUMN/BUMD, dan masyarakat.
S5. Posisi strategis wilayah sebagai koridor pertumbuhan ekonomi regional.
WEAKNESSES (W)
W1. Tingginya backlog perumahan dan rumah tidak layak huni.
W2. Cakupan layanan air minum, sanitasi, dan persampahan yang belum merata.
W3. Koordinasi lintas sektor dan lintas OPD yang belum optimal.
W4. Keterbatasan data perumahan dan permukiman yang terintegrasi dan mutakhir.
W5. Ketergantungan pada APBD/APBN dan terbatasnya pembiayaan alternatif.
W6. Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang.
OPPORTUNITIES (O)
O1. Prioritas nasional pada pembangunan perumahan layak dan penanganan kawasan kumuh.
O2. Pertumbuhan pusat-pusat ekonomi dan kawasan strategis wilayah.
O3. Peluang penerapan skema pembiayaan inovatif (KPBU, blended financing, CSR, dana desa).
O4. Perkembangan teknologi digital dalam perencanaan dan pendataan.
O5. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang meningkatkan kebutuhan hunian
THREATS (T)
T1. Risiko lingkungan (banjir, kebakaran lahan, degradasi lingkungan, perubahan iklim).
T2. Konflik lahan dan ketidakpastian status pertanahan.
T3. Kenaikan harga lahan dan rumah yang menurunkan keterjangkauan hunian.
T4. Disparitas kualitas permukiman antarwilayah.
T5. Tumpang tindih regulasi dan kompleksitas perizinan

Matriks SWOT menunjukkan bahwa pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah memiliki potensi yang signifikan, namun masih menghadapi berbagai keterbatasan internal dan tantangan eksternal. Optimalisasi potensi lahan, dukungan kebijakan, dan kolaborasi lintas sektor perlu diimbangi dengan penguatan tata kelola, pemerataan layanan dasar, pengendalian tata ruang, serta mitigasi risiko lingkungan. Matriks tersebut menjadi landasan strategis dalam perumusan kebijakan dan program bidang perumahan dan kawasan permukiman, guna mendorong terwujudnya hunian layak, kawasan permukiman yang tertata, serta pembangunan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN



BAB 2

TUJUAN DAN SASARAN

2.1. TUJUAN BP3KP KALIMANTAN I

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I merumuskan tujuan yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan, serta sasaran strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam rangka mewujudkan visi Presiden “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”, Presiden memiliki misi yaitu delapan Asta Cita. Berdasarkan delapan Asta Cita tersebut dan amanat RPJMN Tahun 2025– 2029, Kementerian menjadi penyokong utama Asta Cita 6, yaitu “Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan” yang kemudian diselaraskan menjadi misi Kementerian periode 2025–2029. Selain menyokong Asta Cita Nomor 6 menjadi Misi Kementerian, Kementerian juga mendukung terlaksananya Asta Cita 3 dan 8 dalam pelaksanaan kebijakan.

Dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, ditetapkan dua tujuan strategis yang menjadi landasan pelaksanaan kebijakan dan program Kementerian selama periode 2025–2029. Masing-masing tujuan tersebut disertai dengan indikator tujuan untuk mengukur ketercapaiannya. Sebagaimana terlampir pada Tujuan Kementerian dikemukakan berikut ini.

a. Tujuan pertama adalah:

“Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif” Tujuan Pertama ini memiliki indikator:

- 1) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pembangunan baru;
- 2) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas;
- 3) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas;
- 4) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu;
- 5) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas hunian vertikal;
- 6) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui fasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau;
- 7) Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;
- 8) Persentase terwujudnya tata kelola hunian publik, privat, dan perlindungan konsumen;
- 9) Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi.

b. Tujuan kedua adalah:

“Peningkatan kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman”, dengan indikator tujuan dari tersebut yaitu persentase peningkatan tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2.2. SASARAN PROGRAM

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT), Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I melaksanakan kegiatan dengan mengintervensi beberapa Sasaran Program sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.1, yaitu tiga sasaran program yang diturunkan dari sasaran strategis SS-1, dan satu sasaran program yang diturunkan dari sasaran strategis SS-2.



Gambar 2.1 Pohon Kinerja Sasaran Program BP3KP Kalimantan I

Sasaran Program dari Kementerian PKP yang diintervensi yaitu Sasaran Program SP-1 “Meningkatnya Hunian Layak”, SP-2 “Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh”, dan SP-3 “Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman” yang diturunkan dari Sasaran Strategis SS-1 “Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan”. Sedangkan untuk sasaran program yang diturunkan dari Sasaran Strategis SS-2 yaitu terdapat Sasaran Program SP-1 “Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I”.

**Tabel 2.1 Penjabaran Program dan Kegiatan BP3KP Kalimantan I
di bawah Sasaran Strategis-1**

Tujuan 1:		
Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif		
SS-1: Meningkatkan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan		
SP-1: Meningkatkan Hunian Layak		
K1	Penyelenggaraan Sistem dan Strategi	
	SK	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I
K2	Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum	
	SK	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I
K3	Penyediaan Rumah Layak Huni	
	SK	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni
K4	Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	
	SK	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan
SP-2: Meningkatkan Penanganan Permukiman Kumuh		
K1	Penanganan Permukiman Kumuh	
	SK	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu
SP-3: Meningkatkan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		
K1	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	SK1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman
	SK2	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel
	SK3	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

Berdasarkan Tabel 2.1, terdapat empat kegiatan di bawah SP-1 di mana setiap kegiatan memiliki masing-masing satu sasaran kegiatan. Kemudian terdapat satu kegiatan di bawah SP-2 dan hanya memiliki satu sasaran kegiatan. Sedangkan di bawah SP-3 terdapat satu kegiatan yang memiliki tiga sasaran kegiatan. Ketiga sasaran program yang diintervensi oleh BP3KP Kalimantan I ini merupakan bagian dari Program Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tabel 2.2 Penjabaran Program dan Kegiatan BP3KP Kalimantan I
di bawah Sasasan Strategis-2

Tujuan 2: Peningkatan kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman		
SS-2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP		
SP-1: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I		
K1	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	
	SK	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

Berdasarkan Tabel 2.2 terdapat satu kegiatan yaitu K1 “Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I” yang berada di bawah SP-1, dan hanya memiliki satu sasaran kegiatan yaitu “Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I”. Sasaran program yang diintervensi oleh BP3KP Kalimantan I ini merupakan bagian dari Program Dukungan Manajemen.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN UNIT ORGANISASI

Arah kebijakan unit organisasi dalam pembahasan ini meliputi 5 (lima) unit organisasi, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman yaitu:

- 1) Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui penyediaan serta peningkatan kualitas perumahan, dilakukan dengan menerapkan strategi:
 - a) Percepatan pembangunan baru rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya;
 - b) Percepatan peningkatan kualitas rumah swadaya dan penyediaan sanitasi;
 - c) Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang aman dan terjangkau; dan
 - d) Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum pada hunian tapak dan vertikal.
- 2) Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif, dilakukan dengan menerapkan strategi:
 - a) Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif seperti kredit mikro perumahan dan skema lainnya;
 - b) Pengembangan klinik perumahan untuk mendukung peningkatan kapasitas stakeholder perumahan dan masyarakat; dan
 - c) Dukungan pengembangan perumahan melalui pendekatan hunian berimbang.
- 3) Meningkatkan kualitas permukiman secara terpadu, dilakukan dengan menerapkan strategi pendampingan dan penguatan Pemerintah Daerah dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman terpadu serta penataan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur kawasan permukiman yang meliputi rumah, jalan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan, dan proteksi kebakaran.
- 4) Memperkuat ekosistem perumahan dan kawasan permukiman dalam mendukung hunian layak, dilakukan dengan menerapkan strategi:
 - a) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b) Peningkatan kolaborasi antar *stakeholder* dan penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan perumahan;
 - c) Peningkatan pendataan dan monitoring evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;

- d) Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha perumahan dan fasilitasi perlindungan konsumen perumahan;
- e) Pembinaan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman kepada pemangku kepentingan; dan
- f) Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR.

3.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan meliputi:

- 1) Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perdesaan, dengan strategi:
 - a) Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perdesaan;
 - b) Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perdesaan;
 - c) Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan di wilayah perdesaan;
 - d) Pengembangan model perumahan perdesaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
 - e) Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang layak dan terjangkau tanpa mengurangi lahan produktif di wilayah perdesaan atau menimbulkan konflik agraria.
- 2) Mendorong penyediaan rumah layak melalui skema pembiayaan perumahan inovatif, dengan strategi:
 - a) Pengembangan kerja sama dengan lembaga keuangan mikro di wilayah perdesaan;
 - b) Pengembangan skema tabungan berencana;
 - c) Pengembangan bantuan tunai/in-kind yang terintegrasi dengan program pembangunan desa;
 - d) Pengembangan skema Kredit Renovasi Rumah (KRR) dan Kredit Bangun Rumah (KBR);
 - e) Pengembangan kerja sama dengan koperasi sebagai wadah untuk masyarakat perdesaan dalam mengakses pembiayaan perumahan; dan
 - f) Peningkatan subsidi pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, SSB dan SBUM untuk MBR di wilayah perdesaan.
- 3) Menyediakan sistem regulasi, pemanfaatan teknologi serta mengembangkan pola koordinasi, dengan strategi:
 - a) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman perdesaan serta perumusan kebijakan dan strategi jangka panjang perumahan di wilayah perdesaan;
 - b) Penyusunan NSPK di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian perumahan perdesaan;
 - c) Penyusunan NSPK di bidang penyusunan skema pembiayaan perumahan perdesaan;

- d) Penyusunan NSPK di bidang pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
 - e) Penyusunan panduan pembinaan teknis dan supervisi penyelenggaraan perumahan perdesaan;
 - f) Penyusunan panduan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan
 - g) Pengembangan diversifikasi model perumahan perdesaan yang sesuai dengan konteks lokal.
- 4) Meningkatkan kolaborasi antar *stakeholder* dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perdesaan, dengan strategi:
- a) Peningkatan kolaborasi pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga), pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan;
 - b) Peningkatan kapasitas stakeholder dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perdesaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
 - c) Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perdesaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - d) Pelaksanaan koordinasi antar stakeholder terkait penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan
 - e) Penguatan kelembagaan.

3.1.3. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan meliputi:

- 1) Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perkotaan, dengan strategi:
 - a) Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perkotaan;
 - b) Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perkotaan;
 - c) Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan di wilayah perkotaan; dan
 - d) Pengembangan model perumahan perkotaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- 2) Optimalisasi pemanfaatan lahan milik negara/daerah/BUMN serta mendorong pengembangan perumahan vertikal, dengan strategi mendorong intensifikasi pemanfaatan lahan melalui skema KPBU dan pendekatan kawasan terpadu (*mixed-use*, TOD).
- 3) Mendorong pembangunan perumahan terintegrasi dengan kawasan strategis dan transportasi publik (TOD), dengan strategi mengembangkan kawasan perumahan berbasis *Transit Oriented Development* (TOD) dan kawasan perkotaan baru.

- 4) Meningkatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perkotaan, dengan strategi:
 - a) Peningkatan kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan;
 - b) Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan;
 - c) Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perkotaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - d) Pelaksanaan koordinasi antar *stakeholder* terkait penyelenggaraan perumahan perkotaan; dan
 - e) Penguatan kelembagaan.
- 5) Penguatan perencanaan, koordinasi, dan integrasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan strategi pengembangan sistem informasi perumahan terintegrasi dan penyelarasan program perumahan antar level pemerintahan.
- 6) Pengembangan skema pembiayaan perumahan berbasis kebutuhan MBR, dengan strategi inovasi pembiayaan mikro perumahan, kredit konstruksi swadaya, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan non-bank.
- 7) Penerapan teknologi konstruksi murah dan cepat serta penguatan sistem informasi perumahan dan permukiman berbasis digital, dengan strategi penggunaan teknologi rancang bangun rumah terkini, digitalisasi sistem monitoring, dan pemutakhiran basis data rumah.
- 8) Percepatan penghunian, dengan strategi revitalisasi rusun, pelatihan pengelolaan rusun oleh penghuni, serta integrasi rusun dengan fasilitas sosial dan ekonomi.

3.1.4. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko (TKPR)

- 1) Menjamin penanganan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan perumahan bagi MBR serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat, dengan strategi penguatan tata kelola dan regulasi atas pelaksanaan bantuan pembangunan maupun peningkatan kualitas rumah baik dalam bentuk intervensi langsung maupun dalam bentuk subsidi serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat bantuan perumahan melalui pemanfaatan data yang terintegrasi secara nasional.
- 2) Peningkatan kualitas tata kelola hunian publik dan hunian privat vertikal melalui penyusunan NSPK yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi penyediaan serta pengelolaan perumahan publik, dengan strategi penguatan tata kelola yang berorientasi

pada ketersediaan hunian yang terjangkau, layak huni, dan berkelanjutan bagi masyarakat, dengan penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

- 3) Mendorong diversifikasi sumber pembiayaan perumahan, mengembangkan dan memperluas skema pembiayaan diluar FLPP 100% KPR, meningkatkan akurasi ketepatan sasaran melalui integrasi data nasional, dan penguatan regulasi dan tata kelola pembiayaan perumahan, dengan strategi sebagai berikut:
 - a) Diversifikasi pendanaan melalui implementasi skema Tapera sebagai tambahan pembiayaan, penggunaan skema pinjaman/hibah multilateral, dan program perumahan hijau dan terjangkau di Indonesia (*Indonesia Green Affordable Housing Program* atau IGAHP).
 - b) Melakukan koordinasi secara intensi dengan Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lain.
 - c) Optimalisasi pemanfaatan DTSEN dan sistem antrean perumahan.
 - d) Regulasi dan tata kelola penyusunan petunjuk teknis, peraturan menteri, dan keputusan menteri untuk mendukung efektivitas kebijakan.
- 4) Penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan strategi penyusunan Surat Edaran Menteri tentang Mekanisme Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 5) Meningkatkan kemitraan dengan stakeholder lain dengan penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan strategi memperluas kemitraan dengan stakeholder lain dan pengaturan mekanisme kemitraan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- 6) Menciptakan sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan diperlukan penguatan terhadap seluruh ekosistem perumahan serta perbaikan tata kelolanya, dengan strategi sebagai berikut:
 - a) *Governance*, penyusunan NSPK dan bimbingan teknis tata kelola dan pengendalian risiko;
 - b) *Risk*, penguatan SPIP dan e-Manajemen Risiko;
 - c) *Compliance*, penancangan dan pembangunan zona integritas, sistem informasi pemantauan TKPR (e-Pantau), Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - d) *Financing*, kerjasama investasi asing, antrean perumahan, FLPP, IGAHP (*Indonesia Green Affordable Housing Program*), skema *off-take guarantee*; dan
 - e) Pembangunan baru atau renovasi melalui CSR dan penyiapan lahan.

3.1.5. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal berperan sentral dalam mendukung keberhasilan program dan kebijakan Kementerian PKP melalui penguatan kelembagaan, pengelolaan sumber daya, dan tata kelola internal. Arah kebijakan ke depan difokuskan pada:

- a) Penguatan Perencanaan dan Penganggaran, melalui strategi:
 - a) Penyusunan kebutuhan anggaran tahunan yang lebih rinci, berbasis data, dan mempertimbangkan pelaksanaan anggaran sebelumnya; dan
 - b) Integrasi antara perencanaan dan penganggaran serta peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi kegiatan.
- b) Transformasi Digital dan Tata Kelola, melalui strategi:
 - a) Transformasi digital dalam layanan administrasi, kepegawaian, pelayanan publik, pengelolaan data dan informasi, serta sistem pengadaan barang dan jasa; dan
 - b) Penyederhanaan proses birokrasi dan peningkatan efisiensi melalui sistem informasi terintegrasi.
- c) Penguatan Sumber Daya Manusia, melalui strategi:
 - a) Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan SDM berbasis Analisis Beban Kerja (ABK) dan kompetensi;
 - b) Pengembangan manajemen talenta ASN melalui pelatihan, promosi berbasis merit, pemetaan karier, serta pembentukan balai kompetensi; dan
 - c) Peningkatan kapasitas SDM di seluruh bidang fungsional, termasuk keuangan, pengadaan, hukum, komunikasi, dan data.
- d) Penguatan Sistem Informasi dan Data, melalui strategi:
 - a) Pengembangan sistem informasi sektoral terintegrasi berbasis Satu Data Indonesia; dan
 - b) Optimalisasi pemanfaatan data sebagai dasar kebijakan, perencanaan, dan evaluasi program secara berbasis bukti (*evidence-based policy*).
- e) Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen, melalui strategi:
 - a) Perbaikan kualitas layanan tata usaha pimpinan, pengelolaan kearsipan, protokoler, serta penyediaan sarana dan prasarana kantor; dan
 - b) Penguatan layanan keamanan, ketertiban, dan kehumasan secara profesional dan responsif.
- f) Percepatan Regulasi dan Advokasi Hukum, melalui strategi:
 - a) Peningkatan kualitas pembentukan produk hukum, pembinaan SDM hukum, dan advokasi hukum yang responsif dan solutif; dan
 - b) Digitalisasi dan penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
- g) Modernisasi dan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan BMN, melalui strategi:
 - a) Pembinaan dan pendampingan intensif terhadap pengelolaan keuangan dan BMN; dan
 - b) Peningkatan akuntabilitas, pengamanan, dan optimalisasi pemanfaatan aset negara.

- h) Penguatan Sistem dan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa, melalui strategi:
 - a) Penguatan kelembagaan UKPBJ dan SDM pengadaan; dan
 - b) Integrasi perencanaan pengadaan dengan penganggaran serta pemanfaatan sistem e-Procurement untuk efisiensi dan transparansi.
- i) Penguatan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik, melalui strategi:
 - a) Penyusunan NSPK komunikasi publik, penguatan pelayanan berbasis TI, dan pengelolaan media digital secara terintegrasi; dan
 - b) Kolaborasi lintas K/L dan media untuk memperluas jangkauan informasi dan mitigasi disinformasi.
- j) Kolaborasi dan Pendanaan Alternatif, melalui strategi:
 - a) Peningkatan sinergi dengan mitra dan pemangku kepentingan termasuk CSR dan sumber pendanaan Non-APBN; dan
 - b) Perencanaan dan pengelolaan dana pinjaman serta program pembiayaan seperti KUR secara terarah dan akuntabel.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BP3KP KALIMANTAN I

Sejalan dengan kebijakan pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang dimuat dalam dokumen RPJPN 2020-2024, RPJMN 2025-2029, Renstra Kementerian PKP 2025-2029, dan Renstra dari masing-masing Unit Organisasi (Sekretariat Jenderal, Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan, dan Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko), arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman oleh Unit Pelaksana Teknis dalam hal ini Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I yaitu:

- a) Meneruskan dari rumusan tindak lanjut atas arahan Presiden terkait target Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau, khususnya bagi MBR;
- b) Mendorong pemerataan pembangunan kawasan permukiman yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia;
- c) Penguatan sinergi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat dengan optimalisasi skema pembiayaan yang inklusif dan inovatif serta integrasi pembangunan perumahan dengan penataan kawasan yang dilengkapi infrastruktur dasar, ruang terbuka hijau, dan akses terhadap layanan publik sebagai bentuk strategi pelaksanaan;
- d) Dengan pendekatan menyeluruh, Program Pembangunan dan Renovasi 3 juta rumah diharapkan menjadi motor penggerak transformasi sektor perumahan dan kawasan permukiman, yang tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga menciptakan lingkungan hidup yang aman, sehat, dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

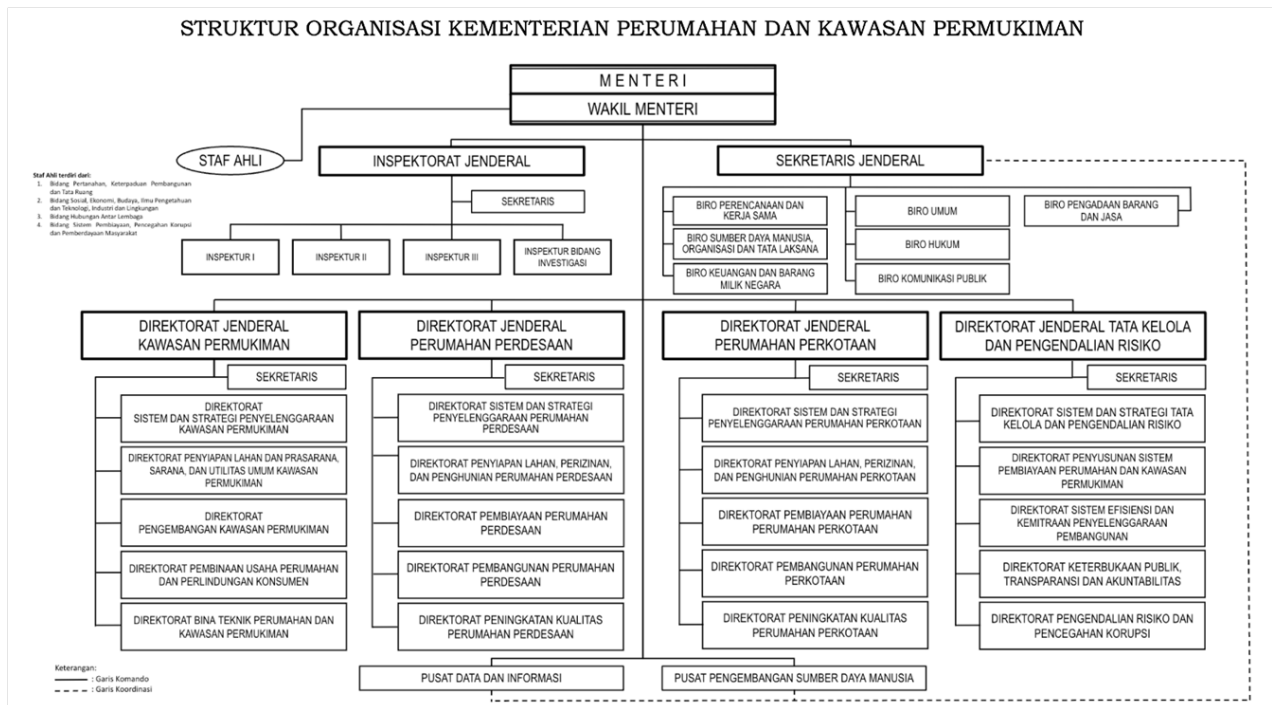
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung rumusan target Kementerian PKP dengan melaksanakan kegiatan yang bersifat intervensi langsung maupun intervensi tidak langsung yang dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Intervensi Langsung dan Tidak Langsung kegiatan BP3KP Kalimantan I

A. Intervensi Langsung	
1)	Pembangunan Rumah Baru berupa hunian vertikal (Rumah Susun) dan/atau hunian tapak (Rumah Khusus) untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat;
2)	Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni, dan Penyediaan Sanitasi Layak;
3)	Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan pada hunian tapak dan/vertikal untuk mendukung fungsi hunian yang layak dan terintegrasi, baik pada hunian tapak maupun vertikal;
4)	Peningkatan kualitas permukiman kumuh;
5)	Memberikan layanan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (Klinik PKP) bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan informasi, pendampingan, dan solusi teknis terkait pembangunan maupun renovasi rumah.
B. Intervensi Tidak Langsung	
1)	Peningkatan sinergi dengan mitra dan pemangku kepentingan, termasuk melalui program CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) atau TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan), untuk mendukung keberhasilan pencapaian target Tiga Juta Rumah;
2)	Penguatan dan sosialisasi informasi program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Subsidi FLPP dalam menyediakan akses terhadap perumahan yang terjangkau dengan bunga dan cicilan rendah, tenor panjang, serta uang muka ringan bagi MBR dalam rangka mempermudah transisi dari pola sewa ke kepemilikan rumah, dan mendorong investasi jangka panjang;
3)	Penguatan dan pemantauan implementasi Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri (Kementerian PKP, Kementerian PU, dan Kemendagri) terkait dengan pembebasan biaya BPHTB serta pembebasan retribusi PBG dan percepatan penerbitan PBG untuk rumah MBR;
4)	Pendampingan kepada Pemerintah Daerah melalui fasilitasi koordinasi penyusunan dokumen <i>readiness criteria</i> dalam proses pengusulan program dan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman melalui Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU) yang juga menjadi instrumen strategis dalam percepatan penyediaan perumahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman di daerah;
5)	Pelaksanaan koordinasi bersama Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya berkaitan dengan pendataan bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam upaya memenuhi capaian program 3 juta rumah.

3.3. KERANGKA KELEMBAGAAN

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian, dibentuk 6 (enam) unit kerja eselon I, serta didukung oleh BP3KP di tingkat provinsi yang bertugas melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial, dan fasilitasi serah terima aset yang dapat dilihat pada Gambar 3.1.



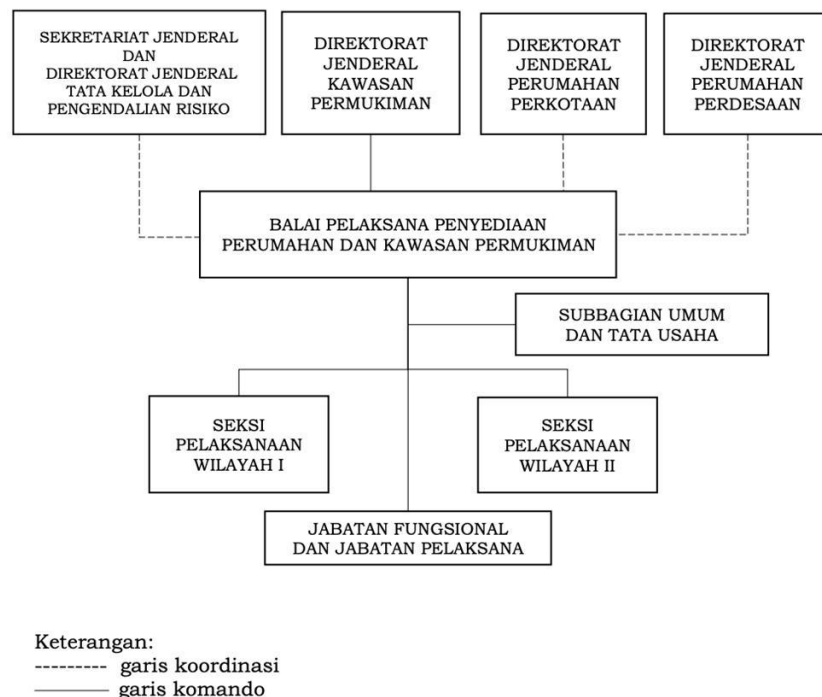
Gambar 3.1 Diagram Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PKP

3.3.1. Struktur Organisasi UPT Balai

BP3KP mempunyai tugas melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial, dan fasilitasi serah terima aset. Adapun fungsi BP3KP adalah menyelenggarakan:

- 1) Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- 2) Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- 3) Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- 4) Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- 5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- 6) Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- 7) Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;
- 8) Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;

- 9) Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- 10) Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- 11) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- 12) Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- 13) Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
- 14) Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
- 15) Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.



Gambar 3.2 Struktur Koordinasi BP3KP

Dalam struktur ini (lihat Gambar 3.2), BP3KP secara langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman. Meskipun demikian, BP3KP memiliki jalur koordinasi dengan unit organisasi lainnya, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, serta Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Keempat unit organisasi tersebut memiliki hubungan koordinatif, ditunjukkan dengan garis putus-putus. BP3KP memiliki beberapa unit kerja di bawahnya, salah satunya adalah Subbagian Umum dan Tata Usaha yang menangani tugas administratif dan kesekretariatan. Selain itu, terdapat dua seksi teknis yang membawahi pelaksanaan kegiatan di wilayah kerja masing-masing, yaitu Seksi Pelaksanaan Wilayah I dan Seksi Pelaksanaan Wilayah II. Kedua seksi ini menjalankan tugas teknis operasional di lapangan sesuai dengan pembagian wilayah yang telah ditentukan.



Gambar 3.3 Struktur Organisasi BP3KP

Di bawah struktur tersebut (lihat Gambar 3.3) juga terdapat jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi teknis maupun administratif sesuai dengan kompetensi masing-masing. Jabatan ini memainkan peran penting dalam operasionalisasi tugas-tugas harian di lapangan maupun di kantor, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pelaporan kegiatan yang menjadi tanggung jawab balai. Secara keseluruhan, struktur ini menggambarkan sistem koordinasi dan komando yang terintegrasi antara tingkat pusat dan pelaksana teknis di daerah untuk memastikan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan secara efisien dan efektif. Mengenai tugas untuk masing-masing jabatan dapat dilihat pada

Tabel 3.2 Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan

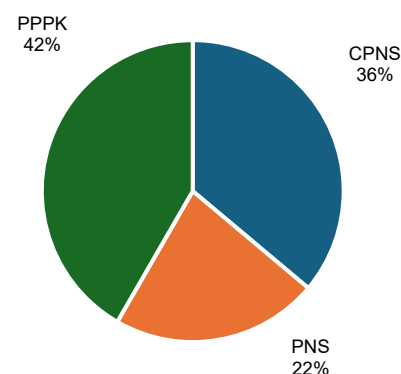
Subbagian Umum dan tata Usaha	a) Melakukan penyusunan program dan anggaran; b) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia; c) Pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan; d) Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas; e) Koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko f) Komunikasi publik; dan g) Layanan hukum balai.
Seksi Pelaksanaan Wilayah I	a) Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial; b) Melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, pada wilayah pesisir.
Seksi Pelaksanaan Wilayah II	a) Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;

	b) Melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, pada wilayah perdesaan dan perkotaan.
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana	a) Memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sesuai bidang keahlian dan keterampilan. (khusus jabatan fungsional: tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jabatan fungsional masing-masing)

Sumber: Peraturan Menteri PKP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

3.3.2. Jumlah dan Komposisi Pegawai BP3KP Kalimantan I Berdasarkan Status Kepegawaian

Berdasarkan Status Kepegawaian ASN, pegawai CPNS pada BP3KP Kalimantan I berjumlah 26 (dua puluh enam) orang, PNS 16 (enam belas) orang dan PPPK 30 (tiga puluh) orang. Rincian kelompok pegawai tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.3. Balai dan Satker PKP Kalimantan Barat memiliki pegawai CPNS terbanyak yaitu masing-masing 11 (sebelas) orang. Sedangkan untuk PPPK terbanyak berada di satker Balai sejumlah 17 (tujuh belas) orang. Dalam persentase (lihat Gambar 1.3), PPPK menempati komposisi terbesar yaitu 42%, diikuti oleh CPNS sebesar 36%, dan PNS sebesar 22%.



Gambar 3.4 Persentase Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian ASN

Tabel 3.3 Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian ASN

No	Unit Kerja	CPNS	PNS	PPPK	Jumlah Pegawai
1	Balai	11	5	17	33
2	Satker PKP Kalimantan Barat	11	6	8	25
3	Satker PKP Kalimantan Tengah	4	5	9	18
Total Pegawai		26	16	30	76

3.3.3. Jumlah dan Komposisi Pegawai BP3KP Kalimantan I Berdasarkan Golongan Jabatan

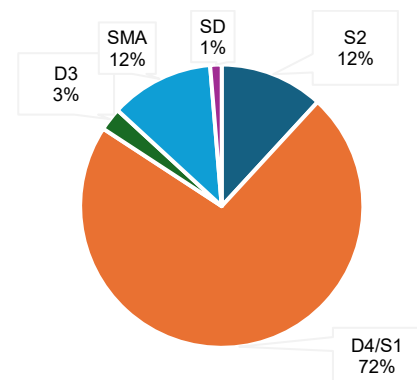
Berdasarkan Golongan Jabatan, pegawai ASN pada BP3KP Kalimantan I didominasi oleh pegawai PNS dengan golongan jabatan III/a sejumlah 26 (dua puluh enam) orang dan PPPK dengan golongan IX sejumlah 23 (dua puluh tiga) orang. Jumlah pegawai dengan golongan IV/a dan IV/b masing-masing hanya berjumlah 1 (satu) orang. Namun terdapat 4 (empat) pegawai PPPK tanpa golongan dengan status PPPK Paruh Waktu. Rincian kelompok pegawai berdasarkan golongan jabatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Jabatan

No	Unit Kerja	Golongan											Total Pegawai
		IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	IX	VII	V	I	-	
1	Balai	1	1	1	1	1	11	12	1	1	-	3	33
2	Satker PKP Kalimantan Barat	-	-	1	4	1	11	4	1	2	-	1	25
3	Satker PKP Kalimantan Tengah	-	-	1	3	1	4	7	-	1	1	-	18
Total Pegawai		1	1	3	8	3	26	23	2	4	1	4	76

3.3.4. Jumlah dan Komposisi Pegawai BP3KP Kalimantan I Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, pegawai ASN pada BP3KP Kalimantan I didominasi oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan D4/S1 sejumlah 55 (lima puluh lima) orang atau sebesar 72%, dan sedikitnya terdapat ASN dengan kualifikasi pendidikan SD sejumlah 1 (satu) orang. Pegawai dengan pendidikan S2 dan SMA keduanya masing-masing berjumlah 9 (sembilan) orang. Rincian kelompok pegawai berdasarkan golongan jabatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.5 dan Gambar 1.4.



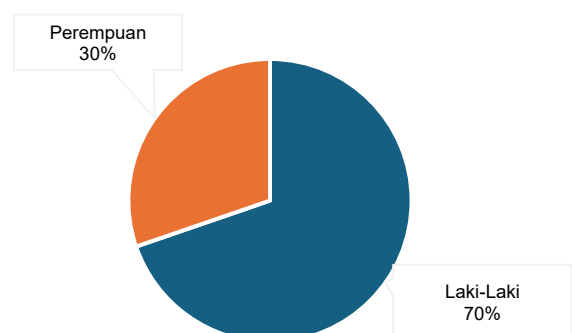
Gambar 3.5 Persentase Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Tabel 3.5 Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Unit Kerja	Kualifikasi Pendidikan					Total Pegawai
		S2	D4/S1	D3	SMA	SD	
1	Balai	5	22	1	5	-	33
2	Satker PKP Kalimantan Barat	1	20	1	3	-	25
3	Satker PKP Kalimantan Tengah	3	13	-	1	1	18
Total Pegawai		9	55	2	9	1	76

3.3.5. Jumlah dan Komposisi Pegawai BP3KP Kalimantan I Berdasarkan Gender

Berdasarkan Gender, komposisi pegawai ASN pada BP3KP Kalimantan I didominasi oleh pegawai Laki-laki sebesar 70% atau sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang. Sedangkan 30% pegawai merupakan perempuan atau sejumlah 23 (dua puluh tiga) orang. Secara rinci, komposisi pegawai tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.6 dan Gambar 1.5



Gambar 3.6 Persentase Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender

Tabel 3.6 Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender

No	Unit Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Pegawai
1	Balai	23	10	33
2	Satker PKP Kalimantan Barat	18	7	25
3	Satker PKP Kalimantan Tengah	12	6	18
Total Pegawai		53	23	76

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



BAB 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Target Kinerja 2025-2029 pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Kalimantan I dibagi menjadi 5 (lima) berdasarkan jumlah DIPA, yaitu meliputi Sekretariat Jenderal, Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan, dan Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Dalam pembahasan ini, Target kinerja dikelompokkan berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan satuan *output* sesuai dengan karakteristik sasaran kegiatannya. Adapun beberapa Kegiatan yang menjadi bagian dari intervensi BP3KP Kalimantan I yaitu:

Tabel 4.1 Daftar Kegiatan BP3KP Kalimantan I

A. Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	1. Penyelenggaraan Sistem dan Strategi; 2. Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum; 3. Penyediaan Rumah Layak Huni; 4. Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan; 5. Penanganan Permukiman Kumuh; 6. Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman;
B. Program: Dukungan Manajemen	
	1. Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

Secara garis besar total target kinerja dalam rentang tahun 2025 hingga tahun 2029 untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu sebesar 43.884 (empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat) Rekomendasi Kebijakan/ Dokumen/ Laporan/ Kegiatan/ Unit/ Hektar. Sedangkan untuk Program Dukungan Manajemen yaitu ditetapkan target kinerja sebesar 113 Layanan. Rincian mengenai gambaran target untuk masing-masing kegiatan dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 4.2 Target Kinerja 2025-2029 BP3KP Kalimantan I

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ OUTPUT KEGIATAN		2025 - 2029	
		TARGET	SATUAN
PROGRAM	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	43,884	Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Kegiatan, Unit
Sasaran Program:	Meningkatnya Hunian Layak	43,831	Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Kegiatan
K 1	Penyelenggaraan Sistem dan strategi	55	Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Kegiatan
SK 1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	55	Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Kegiatan
OK 1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	5	Rekomendasi Kebijakan
OK 2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	4	Dokumen
OK 3	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	3	Laporan
OK 4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	4	Laporan
OK 5	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	1	Kegiatan
OK 6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	4	Rekomendasi Kebijakan
OK 7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	4	Dokumen
OK 8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	14	Laporan
OK 9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	4	Rekomendasi Kebijakan
OK 10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	12	Laporan
K 2	Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum	3,231	Unit, Dokumen, Rekomendasi Kebijakan
SK 2	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	3,231	Unit, Dokumen, Rekomendasi Kebijakan
OK 1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	3,216	Unit
OK 2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	-	Unit
OK 3	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman	-	Laporan
OK 4	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	3	Dokumen
OK 5	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	4	Dokumen
OK 6	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	4	Dokumen
OK 7	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	4	Rekomendasi Kebijakan

K 3	Penyediaan Rumah Layak Huni	40,541	Unit, Laporan, Rekomendasi Kebijakan
SK 3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	40,541	Unit, Laporan, Rekomendasi Kebijakan
OK 1	Jumlah unit rumah swadaya	34,440	Unit
OK 2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	5,704	Unit
OK 3	Jumlah rumah susun yang terbangun	368	Unit
OK 4	Jumlah dokumen teknis penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman	4	Laporan
OK 5	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	2	Laporan
OK 6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	4	Laporan
OK 7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	4	Rekomendasi Kebijakan
OK 8	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	4	Laporan
OK 9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	3	Laporan
OK 10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	4	Rekomendasi Kebijakan
OK 11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	4	Rekomendasi Kebijakan
K 4	Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	4	Rekomendasi Kebijakan
SK 4	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan	4	Rekomendasi Kebijakan
OK 1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	4	Rekomendasi Kebijakan
Sasaran Program:	Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh	35	Hektar
K 1	Penanganan Permukiman Kumuh	35	Hektar
SK 1	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	35	Hektar
OK 1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	35	Hektar
Sasaran Program:	Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	18	Laporan
K 1	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	18	Laporan
SK 1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	4	Laporan
OK 1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	4	Laporan
SK 2	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	5	Rekomendasi Kebijakan
OK 1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	5	Rekomendasi Kebijakan
SK 3	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	9	Rekomendasi Kebijakan
OK 1	Jumlah Penerapan Manajemen Risiko	5	Rekomendasi Kebijakan
OK 2	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	4	Rekomendasi Kebijakan

PROGRAM	DUKUNGAN MANAJEMEN	113	Layanan
Sasaran Program:	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	113	Layanan
K 1	Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	113	Layanan
SK 1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	113	Layanan
OK 1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	15	Layanan
OK 2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	15	Layanan
OK 3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)	12	Layanan
OK 4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	12	Layanan
OK 5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	12	Layanan
OK 6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	15	Layanan
OK 7	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen KP)	4	Layanan
OK 8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	4	Layanan
OK 9	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	4	Layanan
OK 10	Jumlah Layanan BMN (Ditjen KP)	4	Layanan
OK 11	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	4	Layanan
OK 12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	12	Layanan

BP3KP Kalimantan I memiliki beragam *output* kegiatan pada setiap sasaran kegiatan yang diturunkan dari sasaran program yang diintervensi. Dari Tabel 4.2, untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman pada kegiatan Penyelenggaraan Sistem dan Strategi ditetapkan target 2025-2029 yaitu sejumlah 55 rekomendasi kebijakan/ dokumen/ laporan/ kegiatan, kemudian pada kegiatan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum ditetapkan sejumlah 3.231 unit/ dokumen/ rekomendasi kebijakan, kegiatan Penyediaan Rumah Layak Huni sejumlah 40.541 unit/ laporan/ rekomendasi kebijakan, kegiatan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan sejumlah 4 rekomendasi kebijakan, kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh sejumlah 35 hektar, serta Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman sejumlah 18 laporan.

Pada Program Dukungan Manajemen hanya terdapat satu sasaran program yaitu “Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I” dengan penetapan target 2025-2029 pada kegiatan Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I yaitu sejumlah 113 layanan.

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Berdasarkan target kinerja kegiatan 2025-2029 BP3KP Kalimantan I yang sudah ditetapkan sebagaimana telah dibahas pada sub-bab sebelumnya, maka telah ditetapkan juga alokasi kebutuhan pendanaan 2025-2029 untuk mendukung pencapaian target-target tersebut. Secara garis besar total kebutuhan pendanaan dalam rentang tahun 2025 hingga tahun 2029 untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu sebesar 4.428.369.095.000,- (empat triliun empat ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah), dan untuk Program Dukungan Manajemen Sebesar 374.641.721.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah). Rincian kerangka pendanaan untuk masing-masing *output* kegiatan dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan 2025-2029 BP3KP Kalimantan I

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ OUTPUT KEGIATAN		2025 - 2029 PENDANAAN (Rp Ribu)
PROGRAM	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4,428,369,095
Sasaran Program:	Meningkatnya Hunian Layak	4,346,379,204
K 1	Penyelenggaraan Sistem dan strategi	12,116,598
SK 1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	12,116,598
OK 1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	808,769
OK 2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	260,149
OK 3	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	145,789
OK 4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	141,485
OK 5	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	314,114
OK 6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	3,222,209
OK 7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	1,149,522
OK 8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	4,123,443
OK 9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	758,769
OK 10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	1,192,351
K 2	Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum	65,266,697
SK 2	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	65,266,697
OK 1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	50,423,124
OK 2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	-
OK 3	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman	-
OK 4	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	281,361
OK 5	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	12,571,073
OK 6	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	1,579,236
OK 7	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	411,903

K 3	Penyediaan Rumah Layak Huni	4,268,649,043
SK 3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	4,268,649,043
OK 1	Jumlah unit rumah swadaya	920,157,200
OK 2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	2,603,538,623
OK 3	Jumlah rumah susun yang terbangun	721,543,784
OK 4	Jumlah dokumen teknis penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman	383,720
OK 5	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	10,670
OK 6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	2,515,193
OK 7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	1,118,642
OK 8	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	9,105,225
OK 9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	2,151,524
OK 10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	411,903
OK 11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	7,712,559
K 4	Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	346,866
SK 4	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan	346,866
OK 1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	346,866
Sasaran Program:	Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh	78,400,000
K 1	Penanganan Permukiman Kumuh	78,400,000
SK 1	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	78,400,000
OK 1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	78,400,000
Sasaran Program:	Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	3,589,891
K 1	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	3,589,891
SK 1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	352,600
OK 1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	352,600
SK 2	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	974,608
OK 1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	974,608
SK 3	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	2,262,683
OK 1	Jumlah Penerapan Manajemen Risiko	1,218,458
OK 2	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	1,044,225

PROGRAM	DUKUNGAN MANAJEMEN	374,641,721
Sasaran Program:	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	374,641,721
K 1	Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	374,641,721
SK 1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	374,641,721
OK 1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	364,961,148
OK 2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	703,455
OK 3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)	1,035,394
OK 4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	1,580,407
OK 5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	1,083,955
OK 6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	3,131,429
OK 7	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen KP)	53,331
OK 8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	61,269
OK 9	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	325,187
OK 10	Jumlah Layanan BMN (Ditjen KP)	80,213
OK 11	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	325,187
OK 12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	1,300,746

Dari Tabel 4.3, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman pada sasaran program SP-1 “Meningkatnya Hunian Layak” ditetapkan kebutuhan anggaran 2025-2029 sebesar 4.346.379.204.000,- (empat triliun tiga ratus empat puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat ribu rupiah). Adapun rincian untuk masing-masing kegiatan yaitu pada kegiatan Penyelenggaraan Sistem dan Strategi ditetapkan kebutuhan pendanaan sebesar 12.116.598.000,- (dua belas miliar seratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), kegiatan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum sebesar 65.266.697.000,- (enam puluh lima miliar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), kegiatan Penyediaan Rumah Layak Huni sebesar 4.268.649.043.000,- (empat triliun dua ratus enam puluh delapan miliar enam ratus empat puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu rupiah), kegiatan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan sebesar 346.866.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah), kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh sebesar 78.400.000.000,- (tujuh puluh delapan miliar empat ratus juta rupiah), serta kegiatan Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 3.589.891.000,- (tiga miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Pada Program Dukungan Manajemen hanya terdapat satu sasaran program yaitu “Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I” dengan penetapan kebutuhan pendanaan pada kegiatan Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I sebesar 374.641.721.000 (tiga ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

BAB V

PENUTUP



BAB 5

PENUTUP

Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Tahun 2025 – 2029 disusun untuk mendukung Rencana Strategis 5 (lima) Unit Organisasi yang meliputi Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sebagai arahan operasional bagi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mengemban visi, misi dan sasaran yang harus dicapai oleh masing-masing unit organisasi.

Dalam rangka mewujudkan pemenuhan peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif di wilayah kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I selama periode tahun 2025-2029 akan dilaksanakan beberapa program yaitu Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Program Dukungan Manajemen.

Adapun Alokasi Target untuk Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I selama 5 (lima) tahun untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu sebesar 43.884 (empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat) Rekomendasi Kebijakan/ Dokumen/ Laporan/ Kegiatan/ Unit/ Hektar dengan total alokasi kebutuhan pendanaan sebesar 4.428.369.095.000,- (empat triliun empat ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah). Sedangkan untuk Program Dukungan Manajemen ditetapkan target kinerja sebesar 113 (seratus tiga belas) Layanan, dengan alokasi kebutuhan sebesar 374.641.721.000 (tiga ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Proses pencapaian sasaran, target program dan kegiatan dalam Renstra memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan, agar sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal serta mencapai kinerja yang maksimal. Selain itu, perlu dilandasi dengan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan yang optimal. Akhir kata, Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan-I 2025-2029 perlu dijabarkan dalam rencana aksi di masing-masing oleh Balai dan juga Satuan Kerja yang berada di wilayah kewenangan balai secara konsisten.

Evaluasi Renstra dilaksanakan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja strategis yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan melalui pengukuran capaian indikator kinerja utama, indikator program, dan indikator kegiatan dengan membandingkan target dan realisasi kinerja. Proses evaluasi mencakup pengumpulan dan verifikasi data, analisis capaian

dan kesenjangan kinerja, serta penilaian konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program. Adapun pengukuran dan hasil evaluasi Renstra digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program, penyesuaian strategi dan kebijakan, serta penyusunan perencanaan periode berikutnya, sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas kinerja organisasi yang juga dilaporkan ke dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN), baik triwulan maupun tahunan. Dengan mekanisme evaluasi yang terstruktur dan berlandaskan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja, pelaksanaan Renstra BP3KP Kalimantan I diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara optimal dan berkelanjutan.

LAMPIRAN



LAMPIRAN

Lampiran 1 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025-2029 BP3KP Kalimantan I

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Kegiatan, Unit, Hektar	3,061	10,200	10,201	10,201	10,221	43,884	167,733,311	993,798,876	1,024,314,790	1,072,736,067	1,169,786,051	4,428,369,095	
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan															
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS:															
1 Persentase jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi															
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Hunian Layak															
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi		Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Kegiatan	7	12	12	12	12	55	723,653	2,627,633	2,769,525	2,919,079	3,076,709	12,116,598	
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I		Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Kegiatan	7	12	12	12	12	55	723,653	2,627,633	2,769,525	2,919,079	3,076,709	12,116,598	
OUTPUT KEGIATAN:															
1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	50,000	175,000	184,450	194,410	204,908	808,769	
2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	60,000	63,240	66,655	70,254	260,149	
3	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja	Laporan	3	-	-	-	-	3	145,789	-	-	-	-	145,789	
4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	32,632	34,394	36,251	38,208	141,485	
5	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Kegiatan	1	-	-	-	-	1	314,114	-	-	-	-	314,114	
6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	743,160	783,291	825,588	870,170	3,222,209	
7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	265,122	279,439	294,528	310,433	1,149,522	
8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan	2	3	3	3	3	14	213,750	901,719	950,412	1,001,734	1,055,828	4,123,443	
9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	175,000	184,450	194,410	204,908	758,769	
10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan	-	3	3	3	3	12	-	275,000	289,850	305,502	321,999	1,192,351	

KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum		Unit, Dokumen, Rekomendasi Kebijakan	-	807	808	808	808	3,231	-	15,142,757	15,882,510	16,641,854	17,599,576	65,266,697
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I		Unit, Dokumen, Rekomendasi Kebijakan	-	807	808	808	808	3,231	-	15,142,757	15,882,510	16,641,854	17,599,576	65,266,697
OUTPUT KEGIATAN:														
1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit	-	804	804	804	804	3,216	-	11,784,175	12,253,664	12,817,051	13,568,234	50,423,124
2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dokumen	-	-	1	1	1	3	-	-	88,900	93,701	98,760	281,361
5	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	2,899,352	3,055,917	3,220,937	3,394,867	12,571,073
6	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	364,230	383,898	404,629	426,479	1,579,236
7	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	95,000	100,130	105,537	111,236	411,903
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni		Unit, Laporan, Rekomendasi Kebijakan	3,037	9,376	9,376	9,376	9,376	40,541	136,706,194	975,263,736	1,004,808,070	1,052,221,351	1,099,649,692	4,268,649,043
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni		Unit, Laporan, Rekomendasi Kebijakan	3,037	9,376	9,376	9,376	9,376	40,541	136,706,194	975,263,736	1,004,808,070	1,052,221,351	1,099,649,692	4,268,649,043
OUTPUT KEGIATAN:														
1	Jumlah unit rumah swadaya	Unit	3,016	7,856	7,856	7,856	7,856	34,440	102,544,000	190,174,120	199,660,240	209,146,360	218,632,480	920,157,200
2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit	-	1,426	1,426	1,426	1,426	5,704	-	614,527,036	632,932,413	663,003,862	693,075,312	2,603,538,623
3	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit	16	88	88	88	88	368	32,000,000	165,662,184	167,050,400	174,627,200	182,204,000	721,543,784
4	Jumlah dokumen teknis penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	88,500	93,279	98,316	103,625	383,720
5	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh	Laporan	2	-	-	-	-	2	10,670	-	-	-	-	10,670
6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	580,096	611,421	644,438	679,238	2,515,193
7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	258,000	271,932	286,616	302,094	1,118,642
8	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	2,100,000	2,213,400	2,332,924	2,458,901	9,105,225
9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	3	-	-	-	-	3	2,151,524	-	-	-	-	2,151,524
10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	95,000	100,130	105,537	111,236	411,903
11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	1,778,800	1,874,855	1,976,097	2,082,807	7,712,559
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan		Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	80,000	84,320	88,873	93,672	346,866
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan		Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	80,000	84,320	88,873	93,672	346,866
OUTPUT KEGIATAN:														
1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	80,000	84,320	88,873	93,672	346,866

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

2 Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu

SASARAN PROGRAM:

Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh

KEGIATAN:														
Penanganan Permukiman Kumuh	Hektar	15.00	-	-	-	20.00	35.00	30,000,000	-	-	-	48,400,000	78,400,000	

SASARAN KEGIATAN:

Meningkatkan luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu

OUTPUT KEGIATAN:														
1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar	15.00	-	-	-	20.00	35.00	30,000,000	-	-	-	48,400,000	78,400,000

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

3 Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan

SASARAN PROGRAM:

Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

KEGIATAN:														
Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	2	4	4	4	4	18	303,465	684,750	770,365	864,910	966,401	3,589,891	

SASARAN KEGIATAN:

Meningkatkan kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman

OUTPUT KEGIATAN:														
1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	52,600	75,000	100,000	125,000	352,600

SASARAN KEGIATAN:

Meningkatkan dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel

OUTPUT KEGIATAN:														
1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	129,232	182,150	200,365	220,410	242,451	974,608

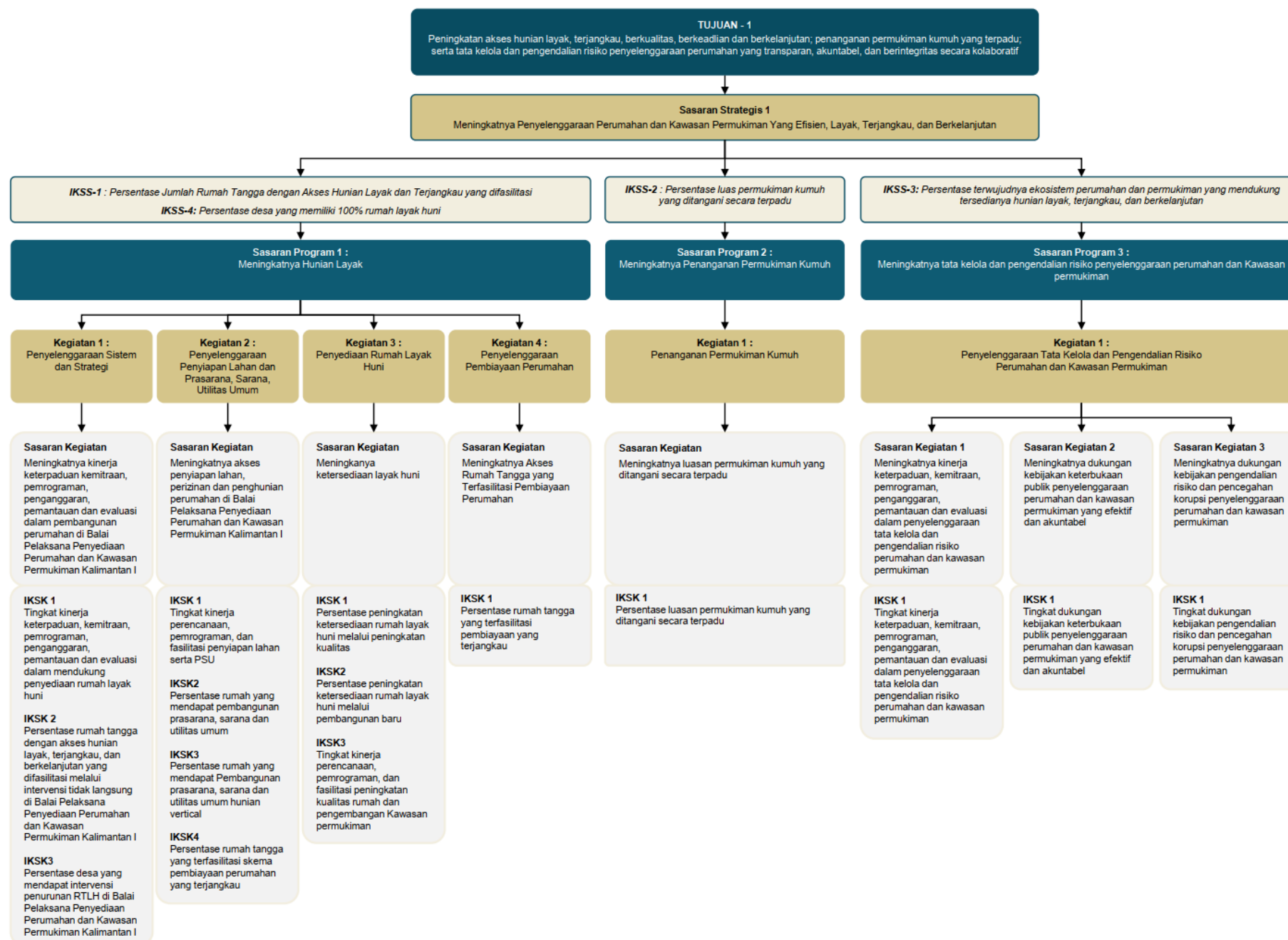
SASARAN KEGIATAN:

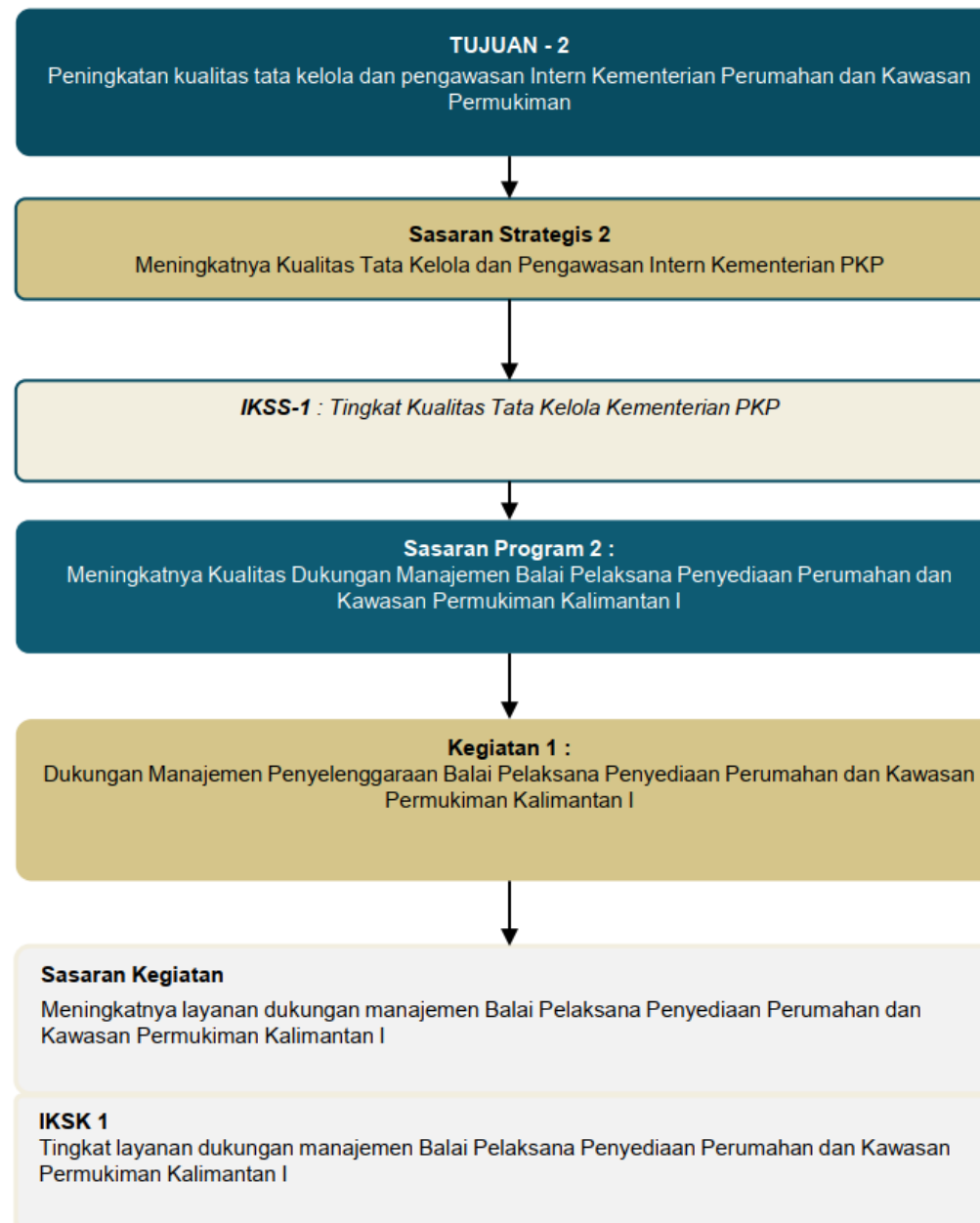
Meningkatkan dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

OUTPUT KEGIATAN:														
1	Jumlah Penerapan Manajemen Risiko	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	174,233	225,000	247,500	272,250	299,475	1,218,458
2	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	225,000	247,500	272,250	299,475	1,044,225

PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN		Layanan	9	26	26	26	26	113	28,627,583	80,271,336	84,290,296	88,510,495	92,942,011	374,641,721
SASARAN STRATEGIS 2:														
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman														
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS														
1 Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman														
SASARAN PROGRAM:														
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I														
KEGIATAN:														
Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I		Layanan	9	26	26	26	26	113	28,627,583	80,271,336	84,290,296	88,510,495	92,942,011	374,641,721
SASARAN KEGIATAN:														
Meningkatnya layanan dukungan manajemen balai pelaksana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman Kalimantan I		Layanan	9	26	26	26	26	113	28,627,583	80,271,336	84,290,296	88,510,495	92,942,011	374,641,721
OUTPUT KEGIATAN:														
1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	Layanan	3	3	3	3	3	15	28,513,843	78,059,756	81,962,744	86,060,881	90,363,925	364,961,148
2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	Layanan	3	3	3	3	3	15	46,592	152,400	160,020	168,021	176,422	703,455
3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)	Layanan	-	3	3	3	3	12	-	238,800	251,695	265,287	279,612	1,035,394
4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan	-	3	3	3	3	12	-	364,500	384,183	404,929	426,795	1,580,407
5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	3	3	3	3	12	-	250,000	263,500	277,729	292,726	1,083,955
6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	Layanan	3	3	3	3	3	15	67,148	710,949	746,497	783,822	823,013	3,131,429
7	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen KP)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	12,300	12,964	13,664	14,402	53,331
8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	14,131	14,894	15,698	16,546	61,269
9	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	75,000	79,050	83,319	87,818	325,187
10	Jumlah Layanan BMN (Ditjen KP)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	18,500	19,499	20,552	21,662	80,213
11	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	75,000	79,050	83,319	87,818	325,187
12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	3	3	3	3	12	-	300,000	316,200	333,275	351,272	1,300,746

Lampiran 2 Metode Perhitungan BP3KP Kalimantan I





METODE PERHITUNGAN BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
SASARAN STRATEGIS 1:					
Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan					
SASARAN PROGRAM 1:					
Meningkatnya Hunian Layak					
Kegiatan 1:					
Penyelenggaraan Sistem dan Strategi					
SK 1 Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	IKSK 1 Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	OK 1 Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 5 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
		OK 2 Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2026: 1 dokumen 2028: 1 dokumen Total : 4 dokumen	Non Kumulatif	Internal
		OK 3 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 3 laporan 2027: 0 laporan 2029: 0 laporan 2026: 0 laporan 2028: 0 laporan Total : 3 laporan	Non Kumulatif	Internal
		OK 4 Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total : 4 laporan	Non Kumulatif	Internal
		OK 5 Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 kegiatan 2027: 0 kegiatan 2029: 0 kegiatan 2026: 0 kegiatan 2028: 0 kegiatan Total : 1 kegiatan	Non Kumulatif	Internal
		OK 6 Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal

			OK 7 Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan Dihitung dari realisasi jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2026: 1 dokumen 2028: 1 dokumen Total : 4 dokumen	Non Kumulatif	Internal
			OK 8 Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan Dihitung dari realisasi jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 laporan 2027: 3 laporan 2029: 3 laporan 2026: 3 laporan 2028: 3 laporan Total : 14 laporan	Non Kumulatif	Internal
			OK 9 Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
			OK 10 Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 laporan 2027: 3 laporan 2029: 3 laporan 2026: 3 laporan 2028: 3 laporan Total : 12 laporan	Non Kumulatif	Internal
Kegiatan 2: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum					
SK 1 Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	IKSK 1 Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum	OK 1 Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 unit 2027: 804 unit 2029: 804 unit 2026: 804 unit 2028: 804 unit Total : 3216 unit	Non Kumulatif	Internal
	IKSK 2 Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal	OK 2 Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 unit 2027: 0 unit 2029: 0 unit 2026: 0 unit 2028: 0 unit Total : 0 unit	Non Kumulatif	Internal
	IKSK 3 Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi penyiapan lahan serta PSU	OK 3 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyiapan lahan dan PSU kawasan permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyiapan lahan dan PSU kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan dan evaluasi penyiapan lahan dan PSU kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 dokumen 2027: 0 dokumen 2029: 0 dokumen 2026: 0 dokumen 2028: 0 dokumen Total : 0 dokumen	Non Kumulatif	Internal

			OK 4	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2026: 0 dokumen 2028: 1 dokumen Total : 3 dokumen		Non Kumulatif	Internal	
			OK 5	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2026: 1 dokumen 2028: 1 dokumen Total : 4 dokumen		Non Kumulatif	Internal	
			OK 6	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2026: 1 dokumen 2028: 1 dokumen Total : 4 dokumen		Non Kumulatif	Internal	
			OK 7	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan		Non Kumulatif	Internal	
Kegiatan 3: Penyediaan Rumah Layak Huni									
SK 1	Meningkatnya ketersediaan layak huni	IKSK 1	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas	OK 1	Jumlah unit rumah swadaya <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah unit rumah swadaya oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi jumlah unit rumah swadaya di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 3.016 unit 2027: 7.856 unit 2029: 7.856 unit 2026: 7.856 unit 2028: 7.856 unit Total : 34.440 unit		Non Kumulatif	Internal
		IKSK 2	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru	OK 2	Jumlah rumah khusus yang terbangun <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah rumah khusus yang terbangun oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi jumlah rumah khusus yang terbangun di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 unit 2027: 1.426 unit 2029: 1.426 unit 2026: 1.426 unit 2028: 1.426 unit Total : 5.704 unit		Non Kumulatif	Internal
				OK 3	Jumlah rumah susun yang terbangun <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah rumah susun yang terbangun oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi jumlah rumah susun yang terbangun di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 16 unit 2027: 88 unit 2029: 88 unit 2026: 88 unit 2028: 88 unit Total : 368 unit		Non Kumulatif	Internal

IKSK 3	Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi peningkatan kualitas rumah dan pengembangan kawasan permukiman	OK 4	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen teknis penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi laporan penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total : 4 laporan	Non Kumulatif	Internal
		OK 5	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 laporan 2027: 0 laporan 2029: 0 laporan 2026: 0 laporan 2028: 0 laporan Total : 2 laporan	Non Kumulatif	Internal
		OK 6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total : 4 laporan	Non Kumulatif	Internal
		OK 7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
		OK 8	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total : 4 laporan	Non Kumulatif	Internal
		OK 9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 3 laporan 2027: 0 laporan 2029: 0 laporan 2026: 0 laporan 2028: 0 laporan Total : 3 laporan	Non Kumulatif	Internal
		OK 10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal

			OK 11 Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Dihitung dari rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 rekomendasi kebijakan
--	--	--	--	--

SASARAN PROGRAM 3: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman						
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman						
SK 1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	IKSK 3	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	OK 1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I mulai tahun 2026 Capaian = Realisasi laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 laporan

OK 3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Kawasan Permukiman)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 layanan 2027: 3 layanan 2029: 3 layanan 2026: 3 layanan 2028: 3 layanan Total : 12 layanan	Non Kumulatif	Internal
OK 4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 layanan 2027: 3 layanan 2029: 3 layanan 2026: 3 layanan 2028: 3 layanan Total : 12 layanan	Non Kumulatif	Internal
OK 5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 layanan 2027: 3 layanan 2029: 3 layanan 2026: 3 layanan 2028: 3 layanan Total : 12 layanan	Non Kumulatif	Internal
OK 6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan sarana internal oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi layanan sarana internal di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 3 layanan 2027: 3 layanan 2029: 3 layanan 2026: 3 layanan 2028: 3 layanan Total : 15 layanan	Non Kumulatif	Internal
OK 7	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Kawasan Permukiman)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
OK 8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
OK 9	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
OK 10	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Kawasan Permukiman)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan BMN oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi layanan BMN di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanann 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal

		OK 11 Jumlah Layanan BMN <i>(Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan BMN oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi layanan BMN di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 12 Jumlah Layanan Reformasi Kinerja <i>(Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan reformasi kinerja oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Capaian = Jumlah realisasi layanan reformasi kinerja di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 layanan 2027: 3 layanan 2029: 3 layanan 2026: 3 layanan 2028: 3 layanan Total : 12 layanan		



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
REPUBLIK INDONESIA

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I



Jl. Imam Bonjol No.116, Benua Melayu Darat, Pontianak
Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat



bp3kp.kalimantan1@pkp.go.id